

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, &

Edisi Maret | Tahun 2022 No. 30

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hermanto, S.E., M.M

Pemerintah Tak Berdaya Kendalikan Harga Pangan



Fokus Sejahterakan Rakyat, **Bukan Bersiasat** Tambah Periode

Perlu kesadaran paripurna dari seluruh anak Republik, bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini bukan angin yang ditiup dari ubun-ubun; halus tanpa hambatan, meninabobokan, melainkan sebuah proses yang diperjuangkan dengan mengorbankan nyawa anak muda yang berpisah dengan orang tua dan kerabatnya.

Beragam komoditas naik perlahan, galibnya malah sebagian hilang entah ke mana. Sebutlah minyak goreng, alih-alih harganya terkendali dan barangnya tersedia. Menteri Perdagangan seperti kehabisan akal dan kewalahan terhadap kelangkaan. Padahal mata rantai komoditas ada dalam ruang kendalanya.

Mendag menduga bahwa kelangkaan terjadi karena ditimun oleh masyarakat. Pemegang otoritas seperti terputus dari realitas, padahal sudah sangat jelas masyarakat antri hingga mengular ke luar gerai atau toko yang menjual minyak goreng. Bahkan ada

yang perlu melampirkan KTP, mencelupkan tinta untuk sekantung minyak goreng.

Seakan ratusan hektare kebun sawit yang terbentang dari Sumatera hingga Papua raib seketika. Menurut data Statista, sepanjang periode 2020-2021 Indonesia menjadi produsen minyak sawit mentah terbesar secara global dengan berkontribusi sekitar 58% dari total produksi CPO dunia. Di posisi kedua, ada negeri jiran Malaysia dengan kontribusi produksi sebesar 26%. Ibarat pepatah 'tikus mati di lumbung padi'. Ironi negeri gemah ripah loh janawi.

Kelangkaan komoditas

pangan berulang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Ada yang berjanji bahwa tidak akan ada lagi impor pangan, untung tidak dapat diraih malang tidak dapat ditolak. Kata telah kehilangan tuah, karena yang terjadi malah gelontoran impor terjadi dengan deras dari hulu hingga hilir. Para pemburu rente meneropong dari jauh, dengan seksama menghitung selisih dari proses jalang singkat penuh mudharat ini.

Siasat berkelindan dalam ruang publik, muncul perlahan namun pasti. Usulan penundaan Pemilu 2024 bergema dengan sangat kencang, bertalu-talu dan

bersahutan dengan jeritan rakyat yang antri beragam komoditas pangan. Suara rakyat memang keras, namun hati dan kehendak berkuasa lebih kuat. Apalah arti gelisah rakyat, jika keinginan berkuasa menyeruak hingga ke pangkal keinginan. Jika perlu tambah jabatan dan tunda pemilu, rasa empati dan jiwa korsa 'taut konstitusi' bisa direka ulang.

Pikirmnya alasan bisa dibuat, konstitusi bisa diubah. Aksi gelisah rakyat dianggap hanya dentuman kecil. Dianggap akan payah sebelum berkembang, jikapun ada 'percik' terjadi dan dilakukan tapi tanpa konsistensi, hilang

seiring bersama dengan waktu. Setidaknya asumsi itu telah terbukti dalam sejumlah aturan yang diusung seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara dan lainnya yang lancar-lancar saja serta relatif tidak ada hambatan.

Perlu kesadaran paripurna dari seluruh anak Republik, bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini bukan angin yang ditiup dari ubun-ubun; halus tanpa hambatan, meninabobokan, melainkan sebuah proses yang diperjuangkan dengan mengorbankan nyawa anak muda yang berpisah dengan orang tua dan kerabatnya.

Anggota FPKS: Pemerintah Tak Berdaya Kendalikan Harga Pangan

KUTIPAN

Para pelaku pasar seperti seirama menahan stok barang. Barang jadi langka, harganya naik, lalu mereka mengambil untung dari kenaikan harga tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat yang mengalami penurunan daya beli karena penghasilan tidak naik

Padang (07/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menilai Pemerintah tak berdaya mengontrol dan mengendalikan harga pangan.

Sejumlah komoditas pangan, ujar Hermanto, belakangan ini seperti susul menyusul mengalami kenaikan harga.

"Kenaikan harga minyak goreng belum juga mampu diatasi, sudah disusul dengan kenaikan harga kedelai, daging sapi, cabai, bawang dan gas," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Para pelaku pasar, katanya, seperti seirama menahan stok barang. Barang

jadi langka, harganya naik, lalu mereka mengambil untung dari kenaikan harga tersebut.

"Hal ini tentu sangat merugikan rakyat yang mengalami penurunan daya beli karena penghasilan tidak naik," ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Sejumlah pedagang, lanjutnya, melakukan protes dan mogok jualan karena stok barang langka dan harga naik.

"Meskipun harga komoditas tersebut sudah naik, barangnya tetap saja langka. Masyarakat tak berdaya menghadapi harga pasar yang tak terkendali," tutur Hermanto.

"Pemerintah mestinya mengambil tindakan tegas

kepada para pelaku penimbunan barang dan menahan masuknya komoditas ke pasar," tandasnya.

Hermanto mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi secara masif tersebut merupakan indikasi akan terjadi inflasi.

"Pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam melakukan pengawasan. Selain itu lakukan operasi pasar secara efektif dan efisien," tandasnya.

Apalagi tidak lama lagi akan memasuki bulan puasa. "Masyarakat butuh ketenangan dalam menjalankan ibadah puasa. Pemerintah wajib memberikan ketenangan tersebut dengan mengupayakan harga pangan yang terjangkau," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Kenaikan berbagai komoditas pangan dan energi secara masif tersebut merupakan indikasi akan terjadi inflasi. Pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam melakukan pengawasan. Selain itu lakukan operasi pasar secara efektif dan efisien"

Harga Kebutuhan Pokok Naik Bersamaan

Tuntaskan Persoalan Pangan

Situasi kenaikan harga pangan yang satu per satu mulai merangkak naik akhir-akhir ini mendapat perhatian serius Fraksi PKS DPR RI.



Andi Akmal: Perlu Pengelolaan yang Optimal

"Persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan Minyak dan Gas Bumi. Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat"



Amin: Ketersediaan Pupuk Vital bagi ketahanan pangan

"Di sektor hulu, pemerintah gagal menjamin ketersediaan pupuk yang sangat vital bagi upaya mempertahankan produksi pangan pokok seperti beras dan jagung. Di berbagai daerah, ratusan ribu petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk terutama pupuk subsidi.



Hermanto: Penimbun Bahan Pokok harus ditindak tegas

"Meskipun harga beberapa komoditas sudah naik, barangnya tetap saja langka. Masyarakat tak berdaya menghadapi harga pasar yang tak terkendali, Pemerintah mestinya mengambil tindakan tegas kepada para pelaku penimbunan barang dan menahan masuknya komoditas ke pasar,"



Johan : Pemerintah Harus Evaluasi kebijakannya

"Pemerintah harus segera evaluasi diri, karena banyak kebijakan yang dibuat tidak per peningkatan produksi seperti pemotongan anggaran Pertanian, penurunan rencana target produksi pangan, ketergantungan impor dan lain sebagainya.

Analogikan Adzan dengan Gonggongan Anjing, FPKS DPR : Yaqut Lukai Perasaan Umat Islam dan **Rusak Toleransi**

KUTIPAN

Jakarta (24/02) --- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai kumandang azan adalah simbol beragama umat Islam yaitu panggilan untuk sholat lima waktu.

Menurut Jazuli, Sangat tidak etis dan keterlaluhan jika Menteri Agama Yaqut Qoumas menganalogikan azan dari pengeras suara dengan gonggongan anjing.

"Pernyataan Yaqut keterlaluhan, tidak etis, dan tidak pada tempatnya. Kami minta segera klarifikasi dan minta maaf," tegas Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, kumandang azan melalui pengeras suara sudah menjadi kearifan umat Islam di Indonesia sejak dahulu. Selama ini tidak ada masalah karena bangsa ini sangat mengedepankan toleransi.

"Umat beragama lain tidak merasa terganggu dan dapat hidup berdampingan secara

damai. Pun, umat Islam di wilayah minoritas juga bisa menerima simbol peribadatan agama lain, seperti acara misa/kebaktian atau penutupan jalan dan penghentian aktivitas ketika acara Nyepi seperti di Pulau Dewata," ungkapnya.

Untuk itu, Anggota DPR Dapil Banten ini meminta Kementerian Agama tidak perlu mengatur-atur soal kumandang azan melalui pengeras suara secara rigid seolah-olah hal itu menimbulkan masalah besar di tengah-tengah masyarakat. Serahkan pada kearifan umat beragama. Yang dikedepankan pemerintah seharusnya narasi dan penguatan toleransi bukan mengatur hal yang sudah

berlangsung lama dan penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat.

"Kumandang azan melalui pengeras suara ini sudah bertahun-tahun menjadi kearifan umat Islam di Indonesia. Umat lain hidup berdampingan dengan azan dan penuh toleransi. Ketika pemerintah mengatur-atur secara rigid hal yang sudah menjadi kearifan apalagi dengan narasi yang buruk akibatnya malah jadi polemik yang kontraproduktif," ungkap Jazuli.

Pernyataan Menteri Agama justru tidak merepresentasikan toleransi, begitu ngotot mengatur suara azan hingga menganalogikan dengan gonggongan anjing.

"Kementerian Agama ini bukan baru dibentuk, Yaqut juga bukan Menteri Agama pertama. Sudah banyak Menteri Agama sebelumnya, tapi tidak begini cara mengelola umat. Menag harus pakai akal sehat dan kearifan," pungkas Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Kumandang azan melalui pengeras suara ini sudah bertahun-tahun menjadi kearifan umat Islam di Indonesia. Umat lain hidup berdampingan dengan azan dan penuh toleransi. Ketika pemerintah mengatur-atur secara rigid hal yang sudah menjadi kearifan apalagi dengan narasi yang buruk akibatnya malah jadi polemik yang kontraproduktif"

Nevi Zuairina Memahami Kekecewaan Para Tokoh Sumbang Atas Analogi Menag Terkait Suara Adzan

KUTIPAN

Sepanjang interaksi dan pengetahuan Nevi, adzan yang diperdengarkan lewat speaker bukan semata sebagai penanda waktu shalat namun syiar yang menegaskan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sumbar. Harmoni dan budaya komunal yang positif sesuai spirit Adaya basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Padang (24/02) — Anggota Legislatif asal Sumatera Barat Nevi Zuairina bisa memahami kegundahan dan perasaan emosional dari sejumlah tokoh Sumbang atas pernyataan Menteri Agama yang menganalogikan kumandang adzan dengan suara gonggongan anjing.

Sepanjang interaksi dan pengetahuan Nevi, adzan yang diperdengarkan lewat speaker bukan semata sebagai penanda waktu shalat namun syiar yang menegaskan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sumbar.

Harmoni dan budaya komunal yang positif sesuai spirit Adaya basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

"Menjadi bahan instropeksi dan evaluasi agar pejabat publik lebih mawas diri dalam membuat pernyataan publik, terlebih pesan tersebut awalnya dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi atas sebuah kebijakan yang kontroversial. Alih-alih menenangkan yang terjadi justru semakin memperkeruh suasana," ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Nevi menambahkan, pejabat publik harus mendorong proses komunikasi yang positif agar menghadirkan suasana yang kondusif.

"Menakar, mengukur dan mengakar dalam setiap pesan yang ingin disampaikan. Agar pada akhirnya sebuah kebijakan tidak kontraproduktif dalam proses implementasinya," jelas Nevi.

Dalam merespon situasi yang ada, Nevi tetap meminta semua pihak untuk dapat dengan tenang dan menempuh jalur konstitusi yang ada.

"Insy Allah sepanjang prosesnya baik, masukan serta saran disampaikan dengan bijak, maka akan ada hasil yang lebih solutif," tutup Nevi.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Menjadi bahan instropeksi dan evaluasi agar pejabat publik lebih mawas diri dalam membuat pernyataan publik, terlebih pesan tersebut awalnya dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi atas sebuah kebijakan yang kontroversial. Alih-alih menenangkan yang terjadi justru semakin memperkeruh suasana"



Fraksi PKS **Dukung** Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Berlaga di Kejuaraan Dunia

KUTIPAN

Jakarta (26/02) --- Fraksi PKS DPR RI menggelar pertandingan persahabatan dengan Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia di Lapangan Sepak Bola Komplek DPR RI pada Sabtu, 26 Februari 2022.

Hadir dalam kesempatan ini Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhuddin dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dan sejumlah Anggota DPR PKS.

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri membuka secara resmi pertandingan dengan kick off bola menggunakan penyangga kaki (kruk) sebagaimana seluruh anggota timnas amputasi.

Dalam sambutannya Salim Segaf mengapresiasi semangat para pemain timnas amputasi untuk berlaga di kejuaraan dunia. Dan untuk itu semua pihak harus mendukung penuh usaha mereka menembus keterbatasan yang ada untuk bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia.

"Kita semua apapun kondisi dan keterbatasan kita adalah satu bangsa dan satu negara, maka PKS hadir untuk mendukung Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia mengembangkan diri dan meraih prestasi di bidang olah raga. PKS hadir untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas," ungkap Salim.

Menteri Sosial Periode 2009-2014 berharap Pemerintah juga hadir untuk mensupport penuh anak bangsa penyandang disabilitas dalam berbagai bidang dan kreativitas.

Apalagi, imbuhnya, Indonesia telah meratifikasi regulasi tentang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan

negara hadir mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan.

"Kami bangga dengan Timnas Amputasi Indonesia yang akan berlaga di tingkat dunia. Bola ini juga mengajarkan kita untuk bekerja sama, berbagi peran, pentingnya kerjasama, untuk tujuan bersama membangun negeri ini. Semoga sukses di kejuaraan Bangladesh dan berikutnya Turki" katanya.

Tokoh Nasional ini berkesimpulan bahwa dirinya saat menjabat Menteri Sosial RI pernah memimpin dan mendampingi langsung para atlet disabilitas untuk mengikuti kejuaraan disabilitas dunia dan luar biasa mereka berprestasi dan mengharumkan nama bangsa.

PKS Berikan Bantuan Pembinaan

Sementara itu, menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pertandingan persahabatan ini digelar untuk mendukung Timnas Amputasi Indonesia yang akan mengikuti turnamen



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Dengan bangga Fraksi PKS menyambut Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia untuk bertanding internasional. Kita support penuh, demikian juga kita berharap pemerintah juga mensupport penuh baik dari segi pembinaan maupun fasilitas!"

internasional di Bangladesh dan Turki. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS memberikan bantuan pembinaan dan membiayai tiket timnas ke turnamen internasional di Bangladesh.

"Dengan bangga Fraksi PKS menyambut Timnas Sepakbola

Amputasi Indonesia untuk bertanding internasional. Kita support penuh, demikian juga kita berharap pemerintah juga mensupport penuh baik dari segi pembinaan maupun fasilitas," ungkap Jazuli.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Penembakan Tewaskan 8 Karyawan PTT di Papua, Aleg PKS: Harus Ada Tindakan Tegas Pemerintah!

KUTIPAN

Yogyakarta (06/03) --- Peristiwa penembakan yang menewaskan 8 karyawan PT Palapa Timur Telematika atau PTT oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Selasa (1/3) mendapat kecaman Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta.

Menurutnya kekerasan yang menewaskan warga sipil di Papua tersebut merupakan tindakan biadab yang harus segera direspon secara tegas oleh pemerintah.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas yang terukur, pertama untuk mengusut secara tuntas peristiwa tragis tersebut dan mengetahui fakta-fakta di lapangan. Kedua, menangkap dan mengadili para pelaku penembakan. Dan ketiga membuat prosedur pengamanan yang lebih bagus

untuk melindungi masyarakat di Papua dari berbagai ancaman kekerasan kelompok teroris TPNPB dan OPM," jelas Sukamta.

Lebih lanjut Sukamta menyatakan apa yang dilakukan oleh para karyawan saat itu untuk memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Distrik Beoga merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat Papua.

"Maka teror penembakan ini semakin menegakkan kelompok TPNPB dan OPM

berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

"Ingatan kita masih terganggu saat 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2018 juga tewas ditembak kelompok ini. Juga ada berbagai peristiwa lainnya yang menasar kelompok sipil. Ini seakan ada pola semakin banyak sasaran sipil yang diteror dan diserang, hal ini harus jadi perhatian pemerintah. Lakukan kajian secara mendalam dinamika sosial politik keamanan yang terjadi di Papua. Sehingga langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal," tutur Sukamta.

Sukamta berharap pemerintah lebih serius untuk mengatasi persoalan di Papua. Upaya percepatan pembangunan yang tertuang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan



H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

"Teror penembakan ini semakin menegakkan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua"

Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) harus mampu mengatasi persoalan mendasar di Papua.

"Hal yang paling mendasar adalah memanusiakan Papua, membuat masyarakat Papua semakin berdaya. Maka upaya percepatan pembangunan harus mampu meningkatkan

kegiatan eksploitasi dan pengerukan kekayaan alam Papua, karena ini akan selalu menghadirkan isu ketidakadilan bagi warga Papua," tutup Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.



Wakil Ketua Komisi I Minta Pemerintah Bergerak Cepat Lindungi WNI di Ukraina

KUTIPAN

Surakarta (25/02) -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasryari, meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk bergerak cepat melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina untuk berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kyiv dan mengambil langkah segera atau bila perlu evakuasi ke negara terdekat yang aman.

"Eskalasi di Ukraina begitu cepat dan rentan terjadi banyak korban, karena dari data KBRI Kyiv ada 138 WNI yang harus segera dilakukan langkah cepat pengamanan hingga bila diperlukan evakuasi sementara ke negara terdekat yang aman" jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Jumat (25/02).

Membaca eskalasi yang cepat dan besar di Ukraina, Anggota DPR asal Solo ini menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan kedekatan baik dengan Ukraina dan Rusia.

Kedekatan tersebut membentuk baik kaitannya

dengan hubungan negara sahabat, perdagangan hingga investasi, karena itu berdasarkan amanah konstitusi Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.

"Sesuai amanah konstitusi, kita diminta berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik.

Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB agar Rusia dan Ukraina segera menyudahi konflik bersenjata ini sebelum jatuh lebih banyak korban," jelas Anggota Parlemen dari FPKS ini.

Selain itu Kharis juga mendukung sikap Kemenlu RI agar Rusia Mentaati hukum Internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengancam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.

"Jadi, DPR dalam berbagai kesempatan selalu mendukung sikap Politik Luar Negeri Kemenlu RI agar setiap negara menekankan penghormatan atas wilayah integral satu negara dan penerapan hukum Internasional," tutup Kharis.



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Sesuai amanah konstitusi, kita diminta berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik."



Penembakan Tewaskan
8 Karyawan PTT di Papua

Pemerintah **Harus** Segera Bertindak!



Maka teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok TPNPB dan OPM berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,"

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI



Aus Hidayat Nur Sayangkan Gubernur Kalimantan Timur Tak Hadir Saat Kunjungan Komisi II DPR

KUTIPAN

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ombudsman dan BPN Kantor Kalimantan Timur ini, telah dipaparkan beberapa laporan dari kegiatan seleksi CPNS dan pertanahan.

Samarinda (22/02) — Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur. Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 di Kalimantan Timur.

Selain itu, Komisi II yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga ingin mengevaluasi pelaksanaan program prioritas pertanahan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur.

"Alhamdulillah dalam pertemuan reses komisi II ini kita berhasil membicarakan hal-hal yang cukup penting di Kalimantan Timur. Sayangnya

Gubernur ataupun Wakilnya tidak hadir. Sehingga, tentu saja hal-hal yang lebih krusial belum bisa kita selesaikan," ungkap Aus Hidayat Nur se usai pertemuan Reses Komisi II di Kantor Gubernur yang hanya diterima oleh Sekretaris Daerah.

Anggota DPR RI dapil Kalimantan Timur ini menyebutkan beberapa contoh persoalan krusial yang hari ini atau dalam waktu dekat akan dihadapi oleh Kalimantan Timur.

"Contohnya lonjakan penduduk yang mungkin akan terjadi di Kalimantan Timur dampak adanya IKN, itu

bagaimana persiapannya?" ujarnya.

Selain itu, Anggota Fraksi PKS ini juga menyebutkan masalah pertanahan yang juga krusial.

"Sengketa-sengketa lahan, baik lahan adat dan sebagainya, yang kini menjadi persoalan krusial di Kalimantan Timur akibat adanya IKN, itu juga belum bisa kita selesaikan," lanjutnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ombudsman dan BPN Kantor Kalimantan Timur ini, telah dipaparkan beberapa laporan dari kegiatan seleksi CPNS dan pertanahan.

"Alhamdulillah tadi Ombudsman dan BPN sudah menjelaskan. Namun itu pengantar, sebab keputusan ada di Gubernur. Dan tadi Gubernur tidak hadir," tutupnya.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Alhamdulillah dalam pertemuan reses komisi II ini kita berhasil membicarakan hal-hal yang cukup penting di Kalimantan Timur. Sayangnya Gubernur ataupun Wakilnya tidak hadir. Sehingga, tentu saja hal-hal yang lebih krusial belum bisa kita selesaikan



Chairul Anwar: Inpres Jual-Beli Tanah Syaratkan BPJS **Jangan** Sulitkan Masyarakat

KUTIPAN

Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar berharap Instruksi Presiden (Inpres) yang mensyaratkan jual-beli tanah harus melampirkan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, agar tidak menyulitkan masyarakat.

Sebab, menurutnya, antara jual-beli tanah dan persoalan kesehatan adalah dua hal yang berbeda. Sehingga, bisa jadi masyarakat yang menjual tanahnya adalah orang yang sedang kesulitan secara keuangan.

"Menurut saya (masyarakat) jangan dipaksa-paksa. Di antara mereka ini ada yang tidak mampu ya kan. Seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah untuk masuk di APBN untuk (mendapatkan subsidi sebagai) masyarakat yang tidak mampu," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Kota Batam,

Kepulauan Riau, baru-baru ini. Chairul menambahkan, aturan tersebut tidak mencampur-adukkan antara yang sudah mampu atau belum dapat membayar BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, ia meyakini pada dasarnya seluruh masyarakat membutuhkan BPJS Kesehatan, baik yang mampu atau belum mampu membayar iuran tersebut. "Nah ini marilah kita kerjakan cara yang arif dan bijaksana. InsyaAllah dia akan tahu sendiri akan pentingnya BPJS Kesehatan ini," jelasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres tersebut berisi instruksi-instruksi kepada berbagai macam kementerian dan lembaga hingga kepala daerah untuk mengoptimalkan JKN.

Selain aturan terkait jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, dan beberapa sektor pelayanan publik lainnya juga mensyaratkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Adapun permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022.



Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi II DPR RI

"Aturan tersebut tidak mencampur-adukkan antara yang sudah mampu atau belum dapat membayar BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, ia meyakini pada dasarnya seluruh masyarakat membutuhkan BPJS Kesehatan, baik yang mampu atau belum mampu membayar iuran tersebut. Nah ini marilah kita kerjakan cara yang arif dan bijaksana. InsyaAllah dia akan tahu sendiri akan pentingnya BPJS Kesehatan ini,



Aleg PKS: Inpres soal BPJS Niatnya Bagus, **tetapi** Caranya Buruk karena Memaksa Rakyat!

KUTIPAN

Jakarta (04/03)- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik cara Pemerintah “memaksa” masyarakat untuk wajib mendaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Menurutnya, Pemerintah perlu menerapkan cara-cara yang lebih ramah terhadap rakyat, khususnya melalui edukasi dan sosialisasi.

"Keinginan Pemerintah untuk memperbaiki jumlah kepesertaan BPJS perlu dimulai dengan sosialisasi yang sesuai dan melihat situasi masyarakat. Perlu menggunakan pendekatan yang lebih ramah dan menekankan kesadaran masyarakat. Maka dari itu, PKS meminta pemerintah mencabut Inpres ini diganti dengan Inpres yang lebih ramah, menjadikan masyarakat sebagai subjek proses BPJS", ungkap Mardani dalam acara PKS Legislative Corner, Jumat siang, (04/03).

Mardani menilai pendekatan tersebut justru

lebih dapat menarik masyarakat untuk mendaftar di BPJS Kesehatan, bukan karena pemaksaan akibat Inpres JKN yang diteken Presiden.

"Jangan buat proses lebih rumit dengan semua pihak harus terjaring hingga tidak relevan dan membuat cost jadi besar. Seharusnya BPJS melakukan akurasi kebijakan yang tepat dan kolaborasi dengan banyak pihak, seperti influencer, guna menjelaskan manfaat dan kemudahan BPJS," ujarnya.

Lebih lanjut, ungkap Mardani, niat baik pun perlu

diikuti dengan cara-cara yang baik, termasuk menyangkut BPJS Kesehatan ini.

"Dilihat dari niatnya, Inpres ini adalah baik, yakni sebagai turunan dari UU BPJS dan UU SJSN. Namun, karena cara yang diterapkan buruk, justru menjadi lebih rumit, dikarenakan jika mengurus untuk jual tanah harus menjadi peserta aktif BPJS, begitu pun dengan urus SIM harus menjadi peserta aktif BPJS sehingga lebih banyak prosesnya. Hal ini pun, bertentangan dengan pola Pak Jokowi, yang ingin tidak banyak peraturan, yang ingin semua dimudahkan, sedangkan dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2022 menambah rumit dan menambah regulasi prosesnya", ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur ini.

Maka dari itu, terus Mardani, PKS menolok cara-cara yang kurang efektif dan efisien tersebut, tetapi tetap mendukung peningkatan layanan dan kepesertaan BPJS Kesehatan di seluruh wilayah nasional.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

“Dilihat dari niatnya, Inpres ini adalah baik, yakni sebagai turunan dari UU BPJS dan UU SJSN. Namun, karena cara yang diterapkan buruk, justru menjadi lebih rumit, dikarenakan jika mengurus untuk jual tanah harus menjadi peserta aktif BPJS, begitu pun dengan urus SIM harus menjadi peserta aktif BPJS sehingga lebih banyak prosesnya. Hal ini pun, bertentangan dengan pola Pak Jokowi, yang ingin tidak banyak peraturan, yang ingin semua dimudahkan, sedangkan dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 2022 menambah rumit dan menambah regulasi prosesnya

Harga Pangan Naik Bersamaan,

Aleg PKS Minta Pemerintah Beri Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

KUTIPAN

Jakarta (07/03) — Situasi kenaikan harga pangan yang satu per satu mulai merangkak mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin.

Pasalnya, ujar Akmal, gejala harga komoditas pangan strategis, seperti Tahu-tempe, Minyak Goreng, Daging, Cabai, Bawang, dan Daging Ayam terus terjadi tiap tahun, dan hingga kini seolah tidak memiliki solusi.

"Ini kondisi Dunia memang tidak baik-baik saja. Ada efek berantai dari situasi dunia mulai dari dampak pandemi hingga konflik eropa yang melibatkan rusia dan ukraina. Tapi dari sisi Sumber Daya Alam, negara kita Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan. Tapi ini sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan", kritis Akmal.

Politisi PKS ini menyarankan, agar pemerintah

segera membuat rekomendasi penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang.

"Menjelang Puasa dan Lebaran, solusi jangka pendek sangat penting segera diberikan agar pangan kita tetap terjangkau dan yang paling penting ada stoknya," ungkap Akmal.

Akmal menambahkan, Solusi Jangka pendek selain operasi pasar, perlu pemerintah membuat aturan HET yang ketat yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat tertentu dengan kemampuan daya beli rendah.

Pemerintah, imbuhnya, mesti mendengar aspirasi dari para peternak, petani, petambak budidaya ikan dan para pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga Pangan.

"Saya sudah

menyampaikan di berbagai kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat, di media baik lisan maupun tertulis, dari sejak tahun 2014, silih berganti presiden RI, tetap saja persoalan pangan ini tidak sesuai harapan masyarakat banyak. Bahkan tahun 2022 ini, kondisinya makin memburuk dimana antrian banyak terjadi dimana-mana untuk mendapat se-liter atau dua liter minyak goreng," pungkasnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan, bahwa Komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa komoditas pangan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

"Masyarakat mayoritas Indonesia yang menggantungkan hajat hidupnya, seharusnya negara turut hadir sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.

Akmal mengutip Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan Minyak dan Gas Bumi. Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat."

banyak dikuasai oleh negara.

Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Desak Pemerintah Segera Atasi Gejolak Harga Daging Sapi

KUTIPAN

Sumbawa (04/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menegaskan agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi di tanah air.

Menurutnya Pemerintah mesti mendengar aspirasi dari para peternak dan pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga daging sapi.

"Mogoknya para pedagang akibat harga daging sapi yang melonjak hingga mencapai Rp 15.000 per kilogram harus segera disikapi, sebab daging sapi ini merupakan komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun," ujar Johan.

Untuk mengatasi gejolak harga daging, politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk menghentikan ketergantungan impor dan melakukan pengembangan sapi lokal terutama di wilayah timur Indonesia.

"Banyak daerah seperti di

Sumbawa, Bima dan lain-lain yang sangat cocok untuk pengembangan sapi secara ekstensif karena tersedia lahan yang luas dan cocok untuk memelihara sapi," tegas Johan agar pemerintah tidak hanya berorientasi impor.

Johan menandakan bahwa penyebab dari terus bergejalanya harga daging setiap tahun karena rendahnya pertumbuhan sapi lokal dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi secara nasional.

"Selain itu, meningkatnya harga daging disebabkan karena ketergantungan terhadap impor bakalan sebagai sumber utama pasokan daging segar," paparnya.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini meminta

pemerintah segera mengatasi masalah ini terutama untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang stabil.

"Harus ada kebijakan penetapan hambatan perdagangan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan impor daging yang malah terus meningkat," usul Johan.

Pemicu melonjaknya harga daging sapi adalah meningkatnya harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia.

Oleh karena itu, lanjut Johan, harus ada keberanian berupa kebijakan untuk menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi melalui peningkatan produksi daging sapi lokal tanpa menguras populasi sapi potong lokal yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha ternak sapi potong.

Legislator Senayan ini mengusulkan agar pemerintah berani membuat terobosan untuk memajukan peternakan sapi di tanah air melalui peningkatan teknologi dalam negeri serta memberikan penurunan suku bunga kredit bagi semua peternak dan pelaku bidang usaha peternakan.

"Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat ditunggu oleh para peternak dan pelaku usaha peternakan untuk peningkatan daya saing peternakan nasional menuju kemandirian pangan nasional," demikian tutup Johan Rosihan.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Harus ada keberanian berupa kebijakan untuk menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi melalui peningkatan produksi daging sapi lokal tanpa menguras populasi sapi potong lokal yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha ternak sapi potong."

Peringati HPSN 2022, Aleg PKS **Ingatkan** Soal Ancaman Limbah Medis Pandemi Covid-19

KUTIPAN

Jakarta (26/02) --- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis angka peningkatan 1,14 poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 bila di bandingkan tahun 2020.

Hal ini diklaim oleh pemerintah sebagai bentuk keberhasilan kinerja perbaikan lingkungan secara umum. IKLH yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS menyatakan meskipun nilai IKLH mengalami peningkatan.

"Pemerintah tidak boleh berpuas diri sebab terdapat beberapa permasalahan utama lingkungan yang sangat mendasak untuk segera ditanggulangi misalnya persoalan timbulan sampah," ujarnya di Jakarta.

Persoalan timbulan sampah ini menjadi perhatian tersendiri dari politisi Partai Keadilan Se-

jahtera ini. Slamet menyebutkan bahwa jika diakumulasikan selama 5 tahun terakhir total timbulan sampah Indonesia mencapai 379,34 juta ton atau rata-rata 75,87 juta ton/tahunnya. Sementara kemampuan mengolah sampah masih dibawah 50% setiap tahunnya.

"Selain itu ancaman dari limbah medis yang bersumber dari penanganan pandemic Covid-19 juga terus mengalami lonjakan menurut data Kementerian kesehatan tahun lalu, timbulan limbah B3 dari Fasilitas Layanan Kesehatan (Fayankes) mencapai 920.224 kg/hari," jelas Slamet.

Menurut data WHO, limbah B3 Fayankes meningkat hingga 10 kali lipat. Pada tahun 2021 juga terdapat gap pengelolaan

limbah B3 Fayankes hingga mencapai 449.574 kg/hari, dari kapasitas kelola timbulan limbah B3 fayankes sebesar 470.650 kg/hari.

"Jika ini dibiarkan tentu saja akan memperburuk kondisi lingkungan secara nasional," ungkapnya.

Meskipun pengelolaan sampah merupakan sesuatu yang mendesak namun dari segi kebijakan nasional belum sepenuhnya mengarah kesana, hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan sampah belum masuk kedalam kategori pelayanan dasar dalam pembagian urusan/kewenangan pusat dan daerah sehingga terkadang penganggaran pengelolaan sampah sangat terbatas.

Slamet mencontohkan bahwa minimnya alokasi anggaran pada Ditjen pengelolaan sampah dan limbah B3 yaitu sebesar Rp. 264 Miliar pada tahun 2022 tidak mencerminkan sikap responsif pemerintah terhadap peningkatan limbah sampah Covid-19 khususnya dan pengelolaan pencemaran sampah pada umumnya.



dr. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah tidak boleh berpuas diri sebab terdapat beberapa permasalahan utama lingkungan yang sangat mendesak untuk segera ditanggulangi misalnya persoalan timbulan sampah,"

"Di sisi yang lain Pemerintah daerah juga kewalahan dalam penyediaan anggaran pengelolaan sampah akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19," ungkapnya.

Melalui momentum HPSN, politisi senior PKS dari kota/kabupaten Sukabumi ini mendorong pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah keluarga

pemilahan dan mekanisme 3R.

"Selain itu Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama mendorong pengarus-utamaan ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah sehingga memberikan sebuah perspektif baru pengelolaan sampah yaitu menghasilkan uang," tutup Slamet.



PKS

KONSOLIDASI NASIONAL & BIMTEKNAS 2022 23-26 MARET 2022

PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

COMING SOON

Aleg PKS: Lokasi IKN Diguncang Gempa, Alasan Pindah Karena Menghindari Gempa **Jadi Tak Relevan**

KUTIPAN

Jakarta (02/03) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS menyoroti terjadinya peristiwa gempa bumi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, Selasa, kemarin (01/03).

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa lokasi IKN sendiri tak sepenuhnya bebas dari potensi gempa bumi, seperti yang telah didengungkan oleh Pemerintah selama ini.

“Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari Selasa, 1 Maret 2022 yang lalu. Hal ini menjadi ironi karena alasan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah dengan alasan potensi ancaman gempa di Jakarta disebabkan oleh aktivitas tektonik dan vulkanik di sekitarnya”, ujar Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu siang, (02/03).

Fakta lain dibebarkan oleh Suryadi, yakni bahwa potensi bencana gempa bumi ternyata tidak masuk sama sekali di dalam Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang IKN.

“Ironi di atas semakin bertambah jika menyimak Pasal 19 UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di IKN mengacu pada Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN. Namun anehnya, Lampiran II berisi Rencana Induk IKN yang menjadi bagian tak terpisahkan dari UU No. 3 Tahun 2022 tersebut sama sekali tidak menyebut terminologi gempa bumi. Prediksi gempa bumi ini seharusnya sudah muncul

ketika awal kajian dan dimasukkan dalam Rencana Induk IKN tersebut”, lanjutnya. Menurut Suryadi, mitigasi

atas setiap potensi bencana alam justru hal yang paling perlu diperhatikan. Terlebih, pada mega proyek seperti Ibu Kota Negara baru.

“PKS menyoroti permasalahan gempa bumi di lokasi IKN ini, meskipun diprediksi tidak besar, tapi jangan sampai disepelekan. PKS meminta mitigasi bencana terutama gempa bumi ini yang lebih jelas untuk jangka pendek hingga panjang di wilayah IKN. Oleh karena itu, PKS mendorong agar Pemerintah lebih riil membuat mitigasi bencana alam terutama gempa bumi di lokasi IKN, jangan terjebak dengan konsep-konsep canggih yang malah tidak jelas indikator efektivitasnya.”, terang Anggota DPR Dapi NTB ini.

Lebih lanjut, Suryadi menerangkan, bahwa Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) BMKG dengan Komisi V DPR RI tanggal 9 Februari 2021, BMKG menyebutkan bahwa tahun 2021 akan dilakukan



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Komisi V DPR RI

“PKS menyoroti permasalahan gempa bumi di lokasi IKN ini, meskipun diprediksi tidak besar, tapi jangan sampai disepelekan. PKS meminta mitigasi bencana terutama gempa bumi ini yang lebih jelas untuk jangka pendek hingga panjang di wilayah IKN”

pengukuran kerawanan seismik di lokasi IKN sebanyak 120-200 titik dengan 3 metode survei dan 9 jenis output pemetaan, di antaranya indeks kerentanan seismik dan skenario guncangan gempa bumi.

“PKS meminta agar kajian BMKG ini menjadi dasar untuk mitigasi bencana gempa bumi dan dimasukkan ke dalam

perincian Rencana Induk IKN, bukan sekedar konsep antah berantah yang disebutkan dalam Rencana Induk IKN, yaitu Sistem Pengamanan Kota Modern (Sispamkota Modern) menggunakan sistem keamanan cerdas dengan data raya, kecerdasan buatan, dan internet of things.”, pungkas Suryadi.



Selain Evakuasi Korban, Aleg PKS Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur di Pasaman dan Pasaman Barat

KUTIPAN

Tasikmalaya (02/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke lokasi gempa di Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat akan mempercepat perbaikan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial(fasos).

"Keberadaan Kepala lembaga dan Kementerian terkait ke daerah bencana akan memacu pemulihan sarana dan prasarana infrastruktur. Terutama perbaikan bangunan fasos dan fasum seperti Rumah Sakit, puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan. Karenanya saya sangat apresiasi kehadiran menteri PUPR", imbuh Politisi asal PKS ini.

Toriq menjelaskan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat memberikan instruksi kepada para kepala balai agar mempercepat koordinasi dengan lembaga dan pemerintah daerah. Menuntaskan inventarisasi

kerusakan infrastruktur fasos dan fasum dilokasi bencana.

"Dari daftar inventarisasi gedung-gedung dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat dapat segera dibuat Surat Keputusan kepala daerah dan diusulkan ke Kementerian PUPR. Sehingga Kementerian dapat membantu perbaikannya, terutama fasos atau fasum yang mengalami kerusakan berat," kata Toriq.

Menurutnya, selain evakuasi korban bencana, hal sangat penting yang secepatnya harus dilakukan, yakni pemulihan sarana dan prasarana infrastruktur agar penanganan bencana itu sendiri bisa

berjalan lancar sampai akhir.

"Fasilitas umum seperti jalan dan jembatan agar juga menjadi prioritas utama untuk dipulihkan. Sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat dan akses logistik bantuan bencana. Selain itu juga mempermudah pendistribusian peralatan penunjang kerja," tambahnya.

Toriq menambahkan Desa Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat yang menjadi daerah paling serius terdampak gempa dilanda longsor, Senin (28/2) malam. Akibat longsor, akses jalan tertutup dan 4 orang relawan yang memberikan bantuan sempat terjebak.

"Saya berharap Kementerian PUPR juga memperhatikan hal ini. Membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Mudah-mudahan akan segera terbuka akses jalan. Sehingga dapat mempermudah masuknya bantuan dan meminimalisir korban. Baik dari relawan maupun warga setempat," tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Selain evakuasi korban bencana, hal sangat penting yang secepatnya harus dilakukan, yakni pemulihan sarana dan prasarana infrastruktur agar penanganan bencana itu sendiri bisa berjalan lancar sampai akhir. Fasilitas umum seperti jalan dan jembatan agar juga menjadi prioritas utama untuk dipulihkan. Sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat dan akses logistik bantuan bencana. Selain itu juga mempermudah pendistribusian peralatan penunjang kerja"

Kunker ke Banjarmasin, Aleg PKS Minta Sistem Resi Gudang **Berdayakan** Petani dan Nelayan

KUTIPAN

Banjarmasin (24/02) --- Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2021 - 2022 ke Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan BAPPEBTI untuk meningkatkan kualitas Resi Gudang sebagai instrumen pemberdayaan petani.

Nevi mengatakan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

"Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktivitasnya. Hal ini bermuara pada meningkatnya daya saing mereka di

perekonomian nasional, dan lebih jauh lagi di pasar dunia", kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mempertanyakan, bagaimana upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah (Kementerian Perdagangan) dan BAPPEBTI mengenai sistem resi gudang di masyarakat khususnya di kalangan petani dan nelayan.

"Sosialisasi ini penting untuk men-standarisasi pengetahuan masyarakat petani berkaitan dengan resi gudang. Saya menyarankan agar ada peningkatan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama lagi di

wilayah Kalimantan Selatan," ujar Nevi.

Politisi PKS ini berharap, pada penerapan Sistem Resi Gudang dapat memberikan realisasi atas penawaran serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah.

Nevi mencontohkan manfaat ini antara lain komoditas yang stabil dan terkendali, jaminan modal produksi, jaminan bahan baku dan lain sebagainya.

"Saya berharap, petani yang sudah terlibat dengan sistem resi gudang (SRG) terutama di Kalimantan Selatan ini sudah meluas. Dampak jangka panjang yang dapat kita rasakan adalah adanya kestabilan harga pangan di masyarakat, yang beberapa bulan terakhir ini harganya sering bergejolak. Pemerintah dan seluruh BUMN yang saling berhubungan pada sistem resi gudang ini mesti optimal untuk meningkatkan kemampuan produksi para petani dan nelayan kita", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya berharap, petani yang sudah terlibat dengan sistem resi gudang (SRG) terutama di Kalimantan Selatan ini sudah meluas. Dampak jangka panjang yang dapat kita rasakan adalah adanya kestabilan harga pangan di masyarakat, yang beberapa bulan terakhir ini harganya sering bergejolak.



Anggota FPKS: Kenaikan Harga BBM Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi Nasional

KUTIPAN

Surabaya (07/03) -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM jenis subsidi.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada saat ini, berpotensi mengganggu upaya pemulihan ekonomi di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Kalau harga BBM naik akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih megap-megap. Jika daya beli kembali turun, maka program pemulihan ekonomi nasional bisa gagal," ujar Amin.

Kenaikan harga BBM bukan hanya mempengaruhi sektor transportasi tapi selalu menimbulkan multiplier effect. Kenaikan biaya transportasi akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang sangat membebani rakyat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM juga akan memicu kenaikan harga bahan baku, keci, baik bagi usaha mikro, kecil, menengah hingga industri

besar.

"Tanpa kenaikan harga BBM subsidi, sejumlah bahan pokok sudah naik karena pemerintah gagal mengelola stabilisasi pasokan. Bisa dibayangkan harga bahan pokok akan terus melonjak jika harga BBM naik," tegasnya.

Kekhawatiran Amin bahwa pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM bersubsidi melihat beberapa gejala, misalnya Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi. Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada 12 Februari 2022 dan per 3 Maret 2022.

Kenaikan harga minyak mentah global mulai berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Sudah dua kali dalam sebulan ini.

Diperkirakan, perang antara Rusia dengan Ukraina

bisa mendorong tren kenaikan harga minyak dunia lebih lama lagi, termasuk Indonesia Crude Price (ICP).

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah Indonesia pada Februari 2022 lalu ditetapkan US\$ 95,72 per barel, naik dari Januari 2022 sebesar US\$ 85,89 per barel. Harga tersebut jauh diatas asumsi APBN 2022 sebesar US\$ 63 per barel.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario penambahan subsidi BBM dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek yang belum mendesak. Jangan sampai karena ambisi pada proyek tertentu, rakyat harus menanggung beban yang semakin berat.

"Kebijakan pemerintah haruslah pro rakyat. Pemerintah juga harus berani dan punya wibawa dihadapan oligarki maupun kartel komoditas pokok yang bersentuhan dengan perut rakyat," ujarnya.

Selain itu, Amin juga mendesak Pemerintah meniru Malaysia dalam pengelolaan industri hilir migas. Ia mengaka



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kebijakan pemerintah haruslah pro rakyat. Pemerintah juga harus berani dan punya wibawa dihadapan oligarki maupun kartel komoditas pokok yang bersentuhan dengan perut rakyat"

heran mengapa harga bahan bakar minyak di dalam negeri masih lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di negeri tetangga, Malaysia.

Sebagai contoh, Amin memaparkan, mengacu pada harga evaluasi mingguan di Malaysia per 27 Januari-2 Februari 2022, harga BBM jenis RON 95 dijual dengan harga RM2.05 atau setara dengan

Rp7.051 per liter dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia 2 Februari 2022 Rp3.440 per Ringgit Malaysia. Harga itu masih lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM jenis Pertalite atau RON 90 yang dijual dengan harga Rp7.650 per liter.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

FPKS DPR RI **Sayangkan** Pemerintah Naikan Harga Gas Elpiji Non Subsidi

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (04/03) -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyalahkan sikap pemerintah yang menaikkan harga gas elpiji non subsidi.

Hal ini Diyakini berdampak kepada para pelaku usaha industri kecil yang memang menggunakan gas non subsidi dalam proses produksinya.

"Memang kalau penggunaan gas elpiji bersubsidi itu 93 persen masyarakat Indonesia. Tapi kan penggunaan gas elpiji non subsidi ini juga enggak semuanya orang kaya, tapi banyak juga usaha atau industri kecil yang pakai. Seperti rumah makan, usaha pembuatan makanan dan lainnya mereka pakai tabung 12 kilogram. Nah kalau naik kan mereka kena imbas, malah nantinya mereka beralih ke elpiji bersubsidi," kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, kepada INILAHKORAN di Soreang, Kamis 3 Maret 2022.

Apalagi, kata Diah sampai dengan saat ini, pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan pence-

gahan agar subsidi gas elpiji ini tepat sasaran. Itu artinya, pemerintah hanya mengandalkan fungsi pengawasan saja.

Jika terjadi peralihan penggunaan dari gas elpiji 12 kilogram non subsidi kepada gas elpiji 3 kilogram bersubsidi tentunya akan semakin memberatkan APBN yang hingga saat ini harus menanggung beban subsidi minyak dan gas (migas).

"Ditengah situasi masyarakat sedang berat, kami dari FPKS sangat menyalahkannya. Karena kenaikan yang berturut-turut BBM naik gas juga naik. Harusnya jangan naik dulu, tunggu sampai perekonomian membaik dulu. Kan masyarakat jadi berat yah," ujarnya.

Diah menjelaskan, meski Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan potensi gas alam yang besar di dunia.

Namun pada kenyataannya, jutaan ton gas elpiji yang setiap hari dikonsumsi masyarakatnya adalah diimpor dari negara lain.

Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memiliki teknologi dan infrastruktur untuk mengolah bahan baku menjadi gas elpiji yang siap digunakan.

"Jadi jutaan ton elpiji itu impor, karena walaupun potensi gas alam kita besar tapi cuma sedikit yang bisa langsung dirubah jadi elpiji. Karena untuk mengubah itu diperlukan teknologi dan infrastruktur tersendiri dan kita tidak punya itu," ujarnya.

Diah melanjutkan, pemerintah tidak bisa selamanya bergantung kepada pasokan impor saja. Namun harus juga mulai melakukan mitigasi usaha serius pada pengolahan sumber daya alam yang ada hingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji di dalam negeri.

"Saya kira dulu saat pemerintah memindahkan dari minyak tanah ke gas elpiji itu rakyat tidak tahu kalau itu impor. Sekarang, ketika harga internasional tinggi yah kena imbas lah kita," katanya.

Sebenarnya, lanjut Diah,



Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol
Anggota Komisi VII DPR RI

“Ditengah situasi masyarakat sedang berat, kami dari FPKS sangat menyalahkannya. Karena kenaikan yang berturut-turut BBM naik gas juga naik. Harusnya jangan naik dulu, tunggu sampai perekonomian membaik dulu. Kan masyarakat jadi berat yah”

sudah ada beberapa daerah di Indonesia yang masyarakatnya bisa mendapatkan pelayanan jaringan gas (jargas), yakni gas alam yang disediakan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Namun sayangnya jumlahnya

masih kecil, yakni hanya sekitar 600 ribu rumah tangga saja. Sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia kurang lebih sebanyak 67 juta keluarga. Selengkapnya kunjungi fraksi.pkis.id



Aleg PKS Desak Menteri Perindustrian Terbuka terhadap Data Produksi Industri Minyak Goreng

KUTIPAN

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, membuka data produksi dan utilitas minyak goreng nasional kepada publik.

karena Menteri masuk dalam hal sangat teknis dan terkesan kurang kerjaan dengan membiarkan fungsi Agama yang menjadi tupoksinya.

Menurut Iskan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan aturan baru mengenai penggunaan peneras suara baik di Masjid maupun Mushalla.

"Menteri menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di masjid dan mushalla," pungkasnya.

Salah satu aturannya, imbuh Iskan, adalah pengurus masjid maupun mushalla harus

pisahkan peneras suara baik untuk dalam masjid dan luar masjid.

"Aturan didalam pedoman ini sangat tidak kompeten dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, pasalnya Negara kita Indonesia ini sangat beragam kearifan lokal, standar pendidikan yang belum rata, ketika kebijakan disama ratakan tanpa melihat kondisi riil daerah dan kearifan lokal sangat tidak pas", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Aturan terkait Surat Edaran Menteri Agama itu harus dievaluasi kembali karena jangan sampai nanti akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu

apalagi Kemenag belum punya peta jalan (road map) pengelola masjid kedepannya.

"Masjid atau musholla itu kan harus ada peneras suara agar masyarakat diingatkan kewajiban solat dengan mendengar Adzan dan Alquran sesaat sebelum masuk waktu sholat menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat peneramah kepada jemaah dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musholla. Hal ini yang perlu digaris bawahi oleh Menag bahwa peneras suara serta volumenya hanya sarana biarlah masyarakat mengatur diri mereka," tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan bahwa Kementerian Agama disini khususnya terkait Surat Edaran Menteri Agama Tentang Aturan Peneras Suara Masjid perlu adanya study yang komprehensif dan selama ini sudah ada panduan Dirjen Bimas Islam.

"Harus adanya evaluasi



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

“Saat ini adalah titik krusial kebijakan DMO CPO dengan DPO. Bila pada titik ini, aman maka secara logika turunannya di sisi distribusi akan kembali lancar. Karena pada bagian distribusi ini tidak ada intervensi kebijakan pemerintah yang baru.”

terhadap arah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama disini, karena masjid juga punya fungsi dakwah sedangkan peneras suara hanya sarana saja, kok Menteri mengurus sarana prasarana yang setiap saat bisa berubah," ungkapnya.

Masjid itu, kata Iskan salah

satu syarat bagi Umat Islam membangun basis sosial bukan hanya ibadah dalam arti sempit. Kalau ini dipermasalahkan jadi masyarakat bertanya-tanya ada apa.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

HNW **Kritisi** Kewajiban BPJS Kesehatan Bagi Calon Jemaah Umrah dan Haji Khusus

KUTIPAN

Jakarta (22/02) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi dan menolak pemberlakuan syarat administratif baru berupa kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi para calon jemaah umrah dan haji khusus, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

HNW sapaan akrabnya menilai aturan wajib kepemilikan kartu BPJS Kesehatan aktif untuk calon jemaah umrah tidak relevan dan akan semakin memberatkan calon jemaah umrah dan haji khusus yang sudah banyak tertunda keberangkatannya selama pandemi covid-19, serta menimbulkan in-efisiensi bagi para calon jemaah umrah dan haji khusus yang umumnya telah memiliki kartu asuransi jaminan kesehatan pribadi.

"Pada prinsipnya kami mendukung suksesnya program BPJS, karena memang bermanfaat untuk warga. Tapi

pastinya dia berlaku secara elegan, program yang prinsipnya sukarela itu pastinya tidak diwajibkan untuk hal-hal yang tidak relevan seperti bagi para calon jemaah haji khusus dan umrah, penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh, serta pendidik dan peserta didik di lingkungan Kementerian Agama," tegas HNW.

Penambahan aturan yang seperti itu, imbuhnya, malah menambah masalah besar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sendiri, juga tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan

debirokratisasi.

"Dalam rangka sukseskan BPJS Kesehatan dalam semangat gotong royong, Presiden seharusnya lebih fokus dan rinci membuat Inpres untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan dan layanan-layanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas-Puskesmas rujukan BPJS Kesehatan. Bukan malah membuat aturan tambahan yang justru menambah beban kepada birokrasi juga kepada kelompok masyarakat yang tak langsung terkait seperti para jemaah umrah dan haji khusus, yang umumnya malah sudah punya kartu asuransi mandiri di luar BPJS Kesehatan," disampaikan Hidayat dalam keterangannya, Selasa (22/02).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, dalam Inpres 1/2022, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2022, terdapat tiga kelompok yang diinstruksikan oleh Presiden bagi Menteri Agama untuk memiliki kepesertaan BPJS aktif, yakni pelaku usaha dan pekerja pada PPIU dan PPIH, calon jemaah umrah dan jemaah haji khusus,



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Harus juga dipertimbangkan sikap dari Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) yang meminta agar jangan sampai ada aturan tambahan yang menyulitkan bagi para jemaah,"

serta peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Kemenag.

Dirinya menilai ketentuan tersebut akan menambah beban yang tidak relevan, pasalnya syarat untuk mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan harus

membayar premi bulanan. Hal ini akan menjadi biaya tambahan bagi calon jemaah, selain juga merugikan bagi mereka yang umumnya telah memiliki asuransi kesehatan pribadi di luar BPJS Kesehatan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



BPJS Jadi Syarat Umrah Dan Haji, Politisi Senior PKS: Cabut Karena Sangat Memberatkan!

KUTIPAN

Jakarta (23/02) --- Politisi senior asal PKS Surahman Hidayat sangat menyesalkan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 yang mewajibkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi calon jamaah umrah dan haji khusus, karena aturan tersebut terlalu mengada-ada dan sangat menambah beban yang tidak logis bagi jamaah. Jakarta, (22/1/2022).

Menurut Surahman yang merupakan anggota Komisi VIII, dalam keterangannya kepada media, bahwa para jamaah umrah dan haji yang sudah lama tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid 19 dipersulit lagi dengan aturan baru yang tidak relevan.

"Haji dan umrah hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan (istitha'ah) dalam aspek finansial, kesehatan, jaminan keamanan dalam perjalanan dan adanya transportasi yang memungkinkan, maka jangan

sampai ada aturan baru yang semakin mempersempit kesempatan orang untuk menunaikannya," jelas Surahman.

Ingres yang mempersyaratkan keikutsertaan aktif BPJS bagi calon jamaah adalah aturan yang mengada-ada dan dipaksa-paksakan.

"Aturan ini semakin menambah berat beban calon jamaah umrah dan haji. Sebab tanpa adanya ingres tersebut pun, para jamaah sudah menanggung beban yang sangat berat karena biaya umrah dan haji di masa pandemi

mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. BPIH tahun ini mengalami kenaikan hampir 100%," tegasnya.

Persyaratan keikutsertaan aktif BPJS bagi calon jamaah umrah dan haji adalah aturan tambahan yang dipaksakan oleh para pejabat yang memiliki otoritas dan kewenangan. Hal tersebut merupakan tindak kesewenang-wenangan yang mengarah kepada kezaliman.

"Oleh karena itu adanya syarat BPJS bagi calon jamaah umrah dan haji harus dicabut. Jangan sampai keuangan BPJS yang bermasalah, lalu ditarik-tarik kepada masalah yang tidak memiliki hubungan sama sekali, bahkan menimbulkan masalah baru," ungkap Surahman.

Masalah keuangan BPJS sambung Surahman sesungguhnya disebabkan karena banyak masyarakat menengah ke bawah yang nunggak iuran BPJS Kesehatan karena tidak mampu bayar.

"Yang prioritas itu pemerintah membenahi DTKS, sebab, apabila masyarakat yang tidak mampu bayar tersebut masuk



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Aturan ini semakin menambah berat beban calon jamaah umrah dan haji. Sebab tanpa adanya ingres tersebut pun, para jamaah sudah menanggung beban yang sangat berat karena biaya umrah dan haji di masa pandemi mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. BPIH tahun ini mengalami kenaikan hampir 100%"

dalam DTKS maka otomatis masuk sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan," tegas Surahman.

Jika masyarakat tersebut masuk dalam PBI Jamkes maka otomatis mereka akan kembali menjadi peserta aktif BPJS kesehatan. Dengan demikian masalah tunggakan-tunggakan masyarakat yang kurang mampu bisa terselesaikan, sehingga

peserta aktif BPJS juga akan meningkat dan optimal.

"Saya minta Pemerintah dalam hal ini Kemenag RI jangan membuat aturan tambahan yang justru menambah beban kepada birokrasi juga kepada kelompok masyarakat yang tak langsung terkait seperti para jamaah umrah dan haji khusus," tutup Surahman.

Menag Atur Pengeras Suara Masjid dan Mushalla

Legislator PKS: Kebijakan tersebut Harus Dievaluasi

KUTIPAN

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai Kebijakan Aturan Menteri Agama Tentang Penggunaan Toa Masjid dirasa sangat tidak strategis,

karena Menteri masuk dalam hal sangat teknis dan terkesan kurang kerjaan dengan membiarkan fungsi Agama yang menjadi tupoksinya.

Menurut Iskan, Menteri Agama Yaqut Cholli Qoumas telah mengeluarkan aturan baru mengenai penggunaan pengeras suara baik di Masjid maupun Mushalla.

"Menteri menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di masjid dan mushalla," pungkasnya.

Salah satu aturannya, imbuh Iskan, adalah pengurus masjid maupun mushalla harus pisahkan pengeras suara baik

untuk dalam masjid dan luar masjid.

"Aturan didalam pedoman ini sangat tidak kompeten dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, pasalnya Negara kita Indonesia ini sangat beragam kearifan lokal, standar pendidikan yang belum rata, ketika kebijakan disama ratakan tanpa melihat kondisi riil daerah dan kearifan lokal sangat tidak pas", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Aturan terkait Surat Edaran Menteri Agama itu harus dievaluasi kembali karena jangan sampai nanti akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu apalagi Kemenag belum punya peta jalan (road map)

mengelola masjid kedepannya.

"Masjid atau musholla itu kan harus ada pengeras suara agar masyarakat diingatkan kewajiban solat dengan mendengar Adzan dan Alquran sesaat sebelum masuk waktu sholat menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat penceramah kepada jemaah dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musholla. Hal ini yang perlu digaris bawahi oleh Menag bahwa pengeras suara serta volumenya hanya sarana biarlah masyarakat mengatur diri mereka," tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan bahwa Kementerian Agama disini khususnya terkait Surat Edaran Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid perlu adanya study yang komprehensif dan selama ini sudah ada panduan Dirjen Bimas Islam.

"Harus adanya evaluasi terhadap arah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama disini, karena masjid juga punya fungsi dakwah sedangkan pengeras suara hanya sarana saja, kok Menteri mengurus sarana prasarana yang setiap saat bisa berubah," ungkapnya.

Masjid itu, kata Iskan salah satu syarat bagi Umat Islam membangun basis sosial bukan hanya ibadah dalam arti sempit. Kalau ini dipermasalahkan jadi masyarakat bertanya-



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Aturan dalam pedoman ini sangat tidak kompeten dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, pasalnya Negara kita Indonesia ini sangat beragam kearifan lokal, standar pendidikan yang belum rata, ketika kebijakan disama ratakan tanpa melihat kondisi riil daerah dan kearifan lokal sangat tidak pas",

tanya ada apa.

"Oleh karenanya saya minta disini Menteri Agama perlu adanya tinjauan ulang terhadap arah kebijakan Surat Edaran ini, karena pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung

jawab Kementerian Agama secara berjenjang dan juga Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan", pungkash Iskan mengakhiri.

Bandingkan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing, Aleg PKS Desak Menag Minta Maaf

KUTIPAN

Jakarta (24/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, melayangkan kritik terhadap ucapan Menteri Agama terkait tanggapannya atas polemik yang berkembang di masyarakat akibat aturan penggunaan pengeras suara masjid/musala yang dirilis oleh Kementerian Agama.

Bukhori merasa keberatan dengan salah satu poin penjelasan Menteri Agama yang menyandingkan kumandang azan dengan gonggongan anjing sehingga menyakiti perasaan umat Islam.

“Niat baik Gus Menteri untuk menyampaikan klarifikasi pada publik karena muncul anggapan bahwa edaran tersebut melarang penggunaan toa masjid/musala sebenarnya patut diapresiasi sebagai langkah untuk meredakan polemik.

Namun sayangnya, beliau gagal dalam memberikan penjelasan yang dibutuhkan publik. Analogi yang digunakan dalam salah

satu poin penjelasannya tidak sesuai dengan konteks. Pemilihan diksi yang diucapkan justru menimbulkan kesan ofensif terhadap umat Islam karena menyinggung bentuk syiar agama mereka. Alih-alih meredakan polemik, reaksi Gus Menteri justru memanasakan situasi dan kembali membuat gaduh publik,” ungkap Bukhori di Jakarta, Kamis (24/02).

Politisi yang pernah menempuh studi ilmu hadis dan studi Islam di Universitas Islam Madina Arab Saudi ini menjelaskan, dari sisi logika ilmiah analogi yang digunakan Menteri Agama dinilai sangat

tidak tepat. Sebab menurutnya, dalam hukum Islam kaidah kias atau analogi menuntut beberapa syarat. Misalnya harus adanya titik persamaan antara hal/keadaan atau benda yang dianalogikan dengan hal/keadaan atau benda yang menjadi objek analogi.

“Gonggongan anjing tentu tidak sama dengan kumandang azan. Sebab, gonggongan anjing tidak bermakna dan tidak menjadi objek hukum dalam ibadah. Sedangkan lafal azan, baik maknanya dan kedudukannya bersifat sakral karena bernilai ibadah. Dengan demikian, sangat naif menganalogikan kumandang suara azan dengan suara anjing yang mengonggong,” jelasnya.

Ketua DPP PKS ini mengingatkan Menteri Agama supaya lebih berhati-hati dalam bertutur maupun bertindak dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik.

“Selain karena peran strategisnya sebagai pelayan umat beragama yang dituntut berlaku adil, mengayomi, dan memuliakan umat beragama, Menteri Agama juga sepatutnya



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Menag juga sepatutnya memahami realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang memandang agama sebagai hal penting dalam hidup mereka. Maka itu, wajar apabila isu kegamaan menjadi sensitif bagi kalangan masyarakat Indonesia”

memahami realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang memandang agama sebagai hal penting dalam hidup mereka. Maka itu, wajar apabila isu kegamaan menjadi sensitif bagi kalangan masyarakat Indonesia,” terang Bukhori.

Hal ini, imbuhnya, diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Pew Research Center bertajuk ‘The Global God Divide’ pada Juli 2020 yang menunjukkan

Indonesia berada di peringkat teratas atau dikategorikan sebagai negara paling religius dari 34 negara yang disurvei. Riset itu membeberkan sebanyak 96 persen responden Indonesia menyatakan beriman kepada Tuhan adalah hal penting untuk dapat bermoral dan memiliki nilai-nilai kebaikan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Sampah Dalam Negeri Tak Tertangani,
Impor Sampah Terus Terjadi

PKS: STOP IMPOR SAMPAH, PEMERINTAH HARUS SERIUS URUS LIMBAH

Setiap tanggal **21 Februari**, Indonesia memperingati **Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)**. Namun, sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan pengelolaan sampah dalam negeri.

Pada tahun 2020 Indonesia menjadi penghasil sampah sebanyak **67,8 juta** ton.



- 37,3%** Rumah Tangga
- 16,4%** Pasar Tradisional
- 15,9%** Sampah Kawasan



Indonesia **terbesar kedua dunia**, dalam menghasilkan **300 kg** limbah makanan per orang per tahun.



1,61 juta metrik ton limbah elektronik di 2019. **Posisi ke lima dunia.**



Impor limbah plastik Indonesia dari tahun ke tahun (ribu ton) :



Pada Permendag 92/2019, **limbah non-B3 yang dapat diimpor** hanya berupa sisa reja (sisa buangan) dan scrap. Limbah yang dimaksud juga tidak terkontaminasi limbah B3 atau limbah lainnya.

Namun, **aturan ini tak selamanya diindahkan**. **Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan** sering mendapati adanya limbah B3 disusupkan masuk dalam kontainer yang berisi limbah non-B3.



Anggota FPKS: Inpres 1/2022 terkait BPJS Kesehatan **Menambah Deretan Beban Rakyat**

KUTIPAN

Jakarta (27/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar Pemerintah lebih meningkatkan asas Kemanusiaan dan Keadilan dalam Optimalisasi JKN. pendekatan melalui 1 Tahun 2022 hanya menambah deretan beban dan kesulitan urusan masyarakat.

Mufida menyebut, sebagai program jaminan yang bersifat universal health care (UHC), pelayanan yang didapatkan dari BPJS Kesehatan masih harus terus ditingkatkan.

Mufida menyebut proses perubahan data, perubahan kelas, pendaftaran dan perubahan status harus terus dibenahi. Kantor-kantor BPJS Kesehatan di berbagai kota/kabupaten setiap hari masih penuh oleh warga yang harus mengurus berbagai keperluan administrasi BPJS secara offline.

Universalitas kepesertaan secara gamblang sudah dinyatakan dalam UU SJSN.

Maka ada kewajiban pemerintah untuk menjamin seluruh WNI, termasuk yang tidak mampu bisa menjadi peserta dengan skema PBI. Kewajiban pemerintah atas kepesertaan BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah, hal ini tidak kemudian dibebankan kepada masyarakat, apalagi di tengah dampak Pandemi yang sudah sangat berat bagi rakyat.

"Kuota PBI wajib segera dipenuhi oleh mereka yang benar-benar tidak mampu. Tekanan ekonomi akibat pandemi itu riil. Amat mungkin justru menambah kuota PBI melihat kondisi riil masyarakat.

Cleansing data DTKS di Kemensos harus segera selesai untuk memenuhi kuota PBI, secara adil dan transparan," kata dia.

Mufida mengatakan, saat ini memang yang menentukan kriteria peserta PBI ada di Kemensos. Mufida mengimbau agar kategori soal warga miskin dan nyaris miskin bisa diperbarui dengan kondisi pandemi saat ini.

"Ada warga dalam kategori nyaris miskin akhirnya tidak bisa tercover dalam PBI padahal realitasnya nyaris miskin ini sangat butuh dan tertekan karena pandemi," ujar dia.

"Selain itu, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa relaksasi iuran BPJS Kesehatan bagi yang sedang mengalami situasi ekonomi berat, agar keaktifan peserta BPJS Kesehatan tetap hidup. Ability to pay masyarakat sedang menurun," tambahan penjelasannya

Terakhir, Mufida menyebut semangat seluruh warga bisa tercover BPJS Kesehatan adalah hal baik. Namun, ia menyebut waktu munculnya Inpres 1



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Publik jangan dihujani dengan kebijakan yang memberatkan dan bertubi-tubi. Kita sepakat semua masyarakat tercover jaminan BPJS, tapi cara dan timing kebijakan untuk menambah kepesertaan bisa lebih baik dengan pendekatan merangkul dibanding membebani,"

Tahun 2022 tidak pas pada situasi merebaknya Omicron dan kelangkaan minyak goreng, bahan pangan seperti tahu tempe dan daging.

"Termasuk kemarin muncul aturan soal pencarian JHT setelah protes sana sini oleh publik dan PKS akhir direvisi. Publik jangan dihujani dengan

kebijakan yang memberatkan dan bertubi-tubi. Kita sepakat semua masyarakat tercover jaminan BPJS, tapi cara dan timing kebijakan untuk menambah kepesertaan bisa lebih baik dengan pendekatan merangkul dibanding membebani," papar Mufida.



Jutaan Vaksin Bakal Kadaluarsa, Aleg PKS Minta Strategi Percepatan Vaksinasi Digenjot

KUTIPAN

Jakarta (01/03) -- Juru Bicara Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menyebut ada enam juta dosis vaksin yang akan kadaluarsa akhir Februari 2022. Vaksin ini adalah jenis vaksin hibah dari negara-negara maju yang disalurkan ke beberapa negara di Afrika maupun Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar mata rantai proses penerimaan, distribusi, penyimpanan hingga penyuntikan dievaluasi dengan mempertimbangkan tanggal kadaluarsa sebuah vaksin.

Mufida meminta jangan sampai jumlah dosis vaksin kadaluarsa bertambah banyak karena anggaran negara sudah digunakan dalam proses penerimaan, distribusi hingga penyimpanan.

"Meskipun vaksinnya gratis tapi proses dari diterima, distribusi hingga penyimpanan memakai anggaran negara. Kalau akhirnya kadaluarsa dan

tidak bisa digunakan bisa mubazir sekaligus pemborosan anggaran negara. Harus dipertimbangkan mata rantai hingga proses vaksinasi dari sisi kadaluarsanya," ungkap Mufida dalam keterangannya, Senin (28/02/2022).

Mufida meminta strategi percepatan vaksinasi perlu dilakukan. Sebab hingga 27 Februari 2022, baru 9 provinsi yang sudah mencapai vaksin lengkap dua dosis.

"Secara nasional saja kita masih kurang sedikit untuk vaksin lengkap dua suntikan baru 69 persen. Bahkan ada tiga provinsi yang cakupan vaksin dosis pertamanya di

bawah 70 persen yakni Maluku, Papua Barat dan Papua. Artinya masih ada warga negara Indonesia yang masuk dalam program vaksin tapi belum mendapat satupun dosis vaksin," kata Mufida.

Ia menyebut percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa jenis vaksin yang mendekati kadaluarsa bisa digunakan sebagai vaksin booster yang capaiannya baru 4,7 persen secara nasional.

"Kemarin sudah ada percepatan untuk Lansia vaksin booster cukup menunggu tiga bulan sejak vaksin kedua tidak harus enam bulan. Ini bisa dikaji untuk petugas publik dan kelompok rentan lainnya bisa tidak cukup tiga bulan jaraknya untuk booster. Tapi ini harus melalui kajian sains dan kesehatan, jika memungkinkan kenapa tidak dilakukan," sebut Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Strategi kedua guna menghindari kemubaziran adalah mengukur diri dan realistis dengan mempertimbangkan



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Butuh pendekatan persuasif dan intensif memang akhirnya butuh ketelatenan. Seperti di Papua masih minim sekali capaiannya bisa lakukan dengan pendekatan kultur,"

dari faktor distribusi dan penyimpanan ke 34 provinsi yang medannya tidak sama serta kesiapan tenaga vaksinator.

"Negara-negara Afrika saja berani menolak saat mau diberikan vaksin gratis yang tanggal kadaluarsanya tidak lama lagi dengan alasan realistis. Kita juga seharusnya bisa mengukur kemampuan penggunaan Vaksin agar tak

terjadi kemubaziran. Vaksin ini bukan hal yang baru, seharusnya kita bisa lebih berpengalaman. Mampu tidak mengjangkau wilayah yang luas dengan waktu yang tersedia. Ini persoalannya dengan penggunaan anggaran negara. Kalau memang tidak mampu berani untuk menolak," kata dia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Politisi PKS Ajak Rakyat **Kawal** Pembatalan Permenaker 2/2022

KUTIPAN

Jakarta (03/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, menanggapi permenaker 2 tahun 2022 yang belum efektif, sehingga muncul pernyataan atau kebijakan Kemenaker yang harus dikawal bersama.

"Terkait JHT kembali ke aturan lama, yang membolehkan pekerja mengambil haknya (JHT) sebelum usia 56 tahun harus dikawal bersama, dan jangan cuman menjadi gimmick politik," ucap Alifudin (3/3).

Alifudin pun berharap juga seharusnya proses revisi Permenaker 2 tahun 2022 segera rampung serta tuntutan buruh, pekerja dan Anggota DPR RI juga harus didengar.

"Pada bulan Mei nanti permenaker 2 tahun 2022 ini akan berlaku efektif jika tidak ada kebijakan tegas dan revisi aturan JHT ini rampung, jadi mohon sekali lagi kepada pemerintah, jangan korbankan rakyat," tegas Alifudin.

Alifudin menambahkan bahwa setiap kebijakan

Pemerintah selalu 'tes policy publik opinion', atau selalu mengecek opini rakyat, agar fokusnya diaduk aduk dengan berbagai masalah.

"Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, walau kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat." Tambah Alifudin.

Alifudin pun menghimbau kepada pemerintah untuk membuat kebijakan atau melakukan revisi yang konkrit dan nyata.

"Saya sarankan kepada buruh, pekerja, dan rakyat, agar terus kawal bersama proses ini. Sehingga kebijakan ini tidak merugikan dan memberatkan rakyat," ujar Alifudin mengakhiri.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

“Setiap kebijakan Pemerintah selalu 'tes policy publik opinion', atau selalu mengecek opini rakyat, agar fokusnya diaduk aduk dengan berbagai masalah. Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, walau kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat”

Pengembangan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi X FPKS: Semua Pihak Harus Terlibat

KUTIPAN

Tegal (04/03) --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyebutkan, pengembangan pariwisata dapat dikembangkan dengan kolaborasi berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan pada saat membuka Gerakan BISA di destinasi wisata Pasar Langgeng Desa Semedo, Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (4/3).

Fikri menuturkan, kolaborasi dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan investor, komunitas dan masyarakat pegiat. Semua pihak harus terlibat.

"Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) tersebut juga dihadiri Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Alexander Reyaan. Pada kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan alat-alat kebersihan, kerja bakti membersihkan destinasi tersebut, dan mengunjungi Museum Semedo,"

ungkap Fikri.

Politisi PKS tersebut menambahkan dalam pengembangan tersebut, perlu dibicarakan 3A; aksesabilitas, amenities dan atraksi. Banyak destinasi wisata masih terkendala hal ini.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak merupakan prinsip pengembangan yang berkelanjutan. Ia mendorong agar pemerintah daerah dan warga setempat bersemangat dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya.

"Kalau semangat ini sudah ada, pemerintah pusat atau swasta akan punya alasan untuk membantu," tutupnya.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Kolaborasi dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan investor, komunitas dan masyarakat pegiat. Semua pihak harus terlibat. Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) tersebut juga dihadiri Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Alexander Reyaan. Pada kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan alat-alat kebersihan, kerja bakti membersihkan destinasi tersebut, dan mengunjungi Museum Semedo"

Menag Atur Speaker Masjid, Legislator PKS: Aturan yang Berlebihan dan Tak Bijak

KUTIPAN

Jakarta (23/02) --- Aturan baru Kementerian Agama soal penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla yang terbit baru-baru ini menuai banyak kritik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sakinah Aljufri pun turut berkomentar.

"Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushalla terlalu berlebihan dan tidak bijak," ungkapnya, Selasa (22/02).

Tidak semua daerah bisa disamakan semua speaker masjid dan mushallanya. Pemerintah juga harus memperhatikan kearifan lokal daerah tertentu.

"Kalau masyarakatnya mayoritas muslim, tentu peraturan ini tidak pas karena

bisa jadi lambat laun justru akan menghilangkan syiar agama Islam," tutur legislator agama asal Sulawesi Tengah.

Sakinah pun menyampaikan bahwa seharusnya aturan tentang pengeras suara tidak hanya berlaku untuk agama tertentu.

"Kenapa yang diatur oleh pemerintah hanya agama tertentu saja. Seharusnya tidak hanya berlaku untuk agama tertentu, khusus untuk masjid dan mushalla saja. Akan tetapi harus berlaku untuk agama dan tempat ibadah lain.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

"Saya justru menyarankan kepada Kementerian Agama dari pada mengatur suara sepiker masjid dan musala, lebih baik memberikan bantuan seperangkat speaker untuk seluruh masjid dan mushalla di Nusantara dan memberikan pelatihan kepada teknisi seoiker masjid agar suaranya merdu dan enak didengar"



Seleksi DK OJK, Aleg PKS: Junjung Tinggi Netralitas, Independensi, Transparansi dan Bertanggungjawab

KUTIPAN

Jakarta (04/03) --- Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 telah menyelesaikan seleksi tahap III terhadap calon anggota DK OJK.

Dari hasil seleksi yang terdiri dari asesmen dan pemeriksaan kesehatan tersebut, pansel menetapkan ada 29 calon yang lolos ke tahap berikutnya. Jumlah tersebut berkurang empat orang dari calon yang lolos pada seleksi tahap II sebanyak 33 orang.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya di Jakarta, Rabu (02/03/2022).

Anis mengatakan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 8 (delapan) syarat sebagai calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yg tertera di situ seharusnya sudah dimiliki para kandidat.

"Jika kedelapan syarat itu

dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta amanah, insya Allah didalamnya sudah include kapabilitas yang mumpuni baik secara jasmani, moral, akhlak dan juga integritas," ungkapnya.

Delapan syarat DK OJK yang tercantum dalam UU no.21 tahun 2011 tersebut adalah WNI, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, sehat jasman, berusia paling tinggi 65 tahun pada 20 Juli 2022, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan dan terakhir tidak pernah dijatuhi

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Menambahkan pandangannya, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menekankan idealnya Dewan Komisiner OJK harus memiliki keahlian yang spesifik.

"Karena industri keuangan lingkungnya sangat luas meliputi perbankan, asuransi, fintech, hingga multifinance, yang masing masing memiliki problem yang berbeda dan khas," ujarnya.

Terkait dengan kandidat DK OJK yang sedang menjalani proses seleksi, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan pada dasarnya setiap nama dari komposisi calon adalah anak-anak bangsa yang hebat.

"Setiap calon harus memiliki dasar niat yang baik dan integritas yang tinggi. Memiliki keinginan bekerja untuk kemuliaan Bangsa dan Negara Indonesia, bukan untuk



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"idealnya Dewan Komisiner OJK harus memiliki keahlian yang spesifik. Karena industri keuangan lingkungnya sangat luas meliputi perbankan, asuransi, fintech, hingga multifinance, yang masing masing memiliki problem yang berbeda dan khas"

kepentingan pribadi atau golongan," ujar Anis.

Adapun penilaian akan potensi munculnya konflik kepentingan, politisi senior PKS ini menilai bahwa konflik kepentingan bisa terjadi dimana saja.

"Dan hal ini harus diminimalisir atau dihindari.

Disinilah pentingnya integritas yang saya sampaikan di atas. Transparansi dan juga akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang juga sudah sangat jelas," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Aleg PKS Terima Aspirasi Honorer K2, Bagaimana nasib K2 Selanjutnya?

KUTIPAN

Rencana penghapusan tenaga honorer mulai 2023 sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

Bandung (04/03) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Teddy Setiadi, menerima audiensi tenaga honorer Kategori 2 (K2) Non Guru di Kota Bandung.

Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi PPPK pada 2018-2019. Namun sampai saat ini masih ada sejumlah tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi ASN.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan tenaga

honorer K2 menyampaikan aspirasinya mengenai kejelasan nasib mereka khususnya untuk Tenaga administrasi dan pustakawan. Pasalnya Pemerintah berencana untuk meniadakan honorer pada tahun 2023.

Rencana penghapusan tenaga honorer mulai 2023 sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023.

Namun demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh serta merta menghapus tenaga honorer tanpa ada pemberian kejelasan status honorer K2.

Menurut Teddy solusinya adalah selesaikan dulu honorer K2, baru silahkan dihapus honorer. Sehingga pengabdian para honorer K2 yang menurut data minimal sudah 18 tahun tidak dilupakan begitu saja.

Teddy menyampaikan bahwa ia bersama fraksi PKS dan Anggota DPR Komisi II lainnya akan berupaya maksimal dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kejelasan status K2 ini bisa segera selesai.

“Semoga ketika rencana penghapusan K2 dilaksanakan, status saudara saudara K2 yang lain sudah selesai, hak mereka harus tetap diberikan, kita tidak boleh menutup mata atas pengabdian bertahun tahun yang telah mereka lakukan” Jelas Teddy



TEDDY SETIADI, S.Sos.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

“Pemerintah tidak boleh serta merta menghapus tenaga honorer tanpa ada pemberian kejelasan status honorer K2. Maka solusinya adalah selesaikan dulu honorer K2, baru silahkan dihapus honorer. Sehingga pengabdian para honorer K2 yang menurut data minimal sudah 18 tahun tidak dilupakan begitu saja.”

Tengah Malam, Hermanto Kunjungi Korban Gempa di Pasaman Barat

KUTIPAN

Pasaman Barat (26/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di dapil.

Hermanto menyempatkan diri mengunjungi korban gempa di Jorong Pasalamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamao, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (25/2/2022) tengah malam.

Di lokasi tersebut, Hermanto memeriksa puing-puing reruntuhan bangunan akibat gempa dan menyerahkan bantuan sembako untuk korban bencana tersebut.

"Bantuan sembako ini merupakan rangkaian dari aktivitas kepedulian Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat yang terkena musibah," papar Hermanto di Pos Bencana PKS di lokasi tersebut.

Kepada para penerima sembako, Hermanto berharap agar bantuan yang diterima bermanfaat dan barokah. "Bantuan ini wujud kepedulian PKS kepada masyarakat. Semoga baik yang memberi maupun

yang menerima bantuan diberkahi," ucap legislator dari FPKS ini.

Jumat pagi pukul 08.39 WIB gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Pasaman Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi di 0.15 derajat Lintang Utara, 99.98 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 km.

Data sementara, korban meninggal akibat gempa empat orang, luka berat 19 orang, luka sedang tujuh orang dan luka ringan 36 orang. Bangunan yang rusak sekitar 5.000 unit, pengungsi 10.000 orang, 35 titik pengungsi dan dipusatkan di halaman kantor bupati setempat.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan di Pasaman Barat tersebut, Hermanto didampingi Ketua DPD PKS Pasaman Barat Supriono.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Bantuan sembako ini merupakan rangkaian dari aktivitas kepedulian Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat yang terkena musibah. Bantuan ini wujud kepedulian PKS kepada masyarakat. Semoga baik yang memberi maupun yang menerima bantuan diberkahi,"



Masa Reses, Rofik Hananto Beri Hadiah Atlet Tenis Cilik Berprestasi Nasional

KUTIPAN

Purbalingga (23/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto memberi perhatian besar kepada Nadine Alexandra Chaerudin, yang merupakan atlet tenis cilik yang mempunyai prestasi Nasional dari Kabupaten Purbalingga.

Rofik yang juga menjabat sebagai Ketua Pengkab Pelti Purbalingga memberikan hadiah berupa tabungan pendidikan untuk Nadine sebesar Rp 1 juta serta uang tunai. Hadiah diserahkan di kediaman Rofik di Purbalingga "Terima kasih kepada Bapak Rofik atas hadiah ini," kata Nadine usai menerima hadiah didampingi beberapa pengurus PELTI dan orang tuanya Fitri Susiadi Chaerudin.

Nadine mendapatkan hadiah tabungan karena menjadi juara III Ganda Putri Ku 10 Tahun dalam Kejuaraan Nasional Tenis Junior "Junio Junior 2022" pada 13-19

Februari di Yogyakarta.

Anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Fitri Susiadi Chaerudin dan Stefani Sisilia yang bercita-cita ingin menjadi pramugari itu masuk Peringkat Nasional Pelti (PNP) 25. Dalam kurun 2 bulan terakhir dia mendapat juara dalam turnamen Tenis Diakui Pelti (TDP).

Prestasi Nadine tidak lepas dari dukungan dari orang tuanya, khususnya ayahnya yang merupakan guru di SMA Negeri 1 Bukateja.

Rofik menilai, Nadine adalah anak yang istimewa. Siswi kelas 3 SDN Purbalingga Lor 1 itu adalah aset Kabupaten

Purbalingga yang membanggakan di bidang olah raga tenis. Tenis itu bisa menjadi karir dan menjadi profesional saat dewasa nanti.

"Namun pendidikan tetap yang utama. Karena itu Nadine tetap harus belajar yang rajin. Sehingga di sekolah juga bisa dapat rangking. Karena itulah kita berikan tabungan pendidikan. Saya berharap, prestasi Nadine ini bisa dicontoh anak-anak lain," kata Rofik.

Rofik juga menegaskan komitmennya untuk mendorong lahirnya atlet-atlet tenis lain dari Kabupaten Purbalingga

"Kami segenap pengurus Pengkab PELTI Purbalingga, terus berkomitmen untuk mendorong lahirnya atlet-atlet tenis berprestasi dari Kabupaten Purbalingga," tegas Rofik.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Pendidikan tetap yang utama. Karena itu Nadine tetap harus belajar yang rajin. Sehingga di sekolah juga bisa dapat rangking. Karena itulah kita berikan tabungan pendidikan. Saya berharap, prestasi Nadine ini bisa dicontoh anak-anak lain"



Bertemu Petani Jahe di Kabupaten Bone, Andi Akmal **Sampaikan** Potensi Ekspor

KUTIPAN

Kabupaten Bone (22/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin pada kunjungan daerah pemilihan di Reses masa persidangan III tahun sidang 2021 - 2022 menemui komunitas petani jahe dan langsung mengunjungi lokasi area penanamannya.

Akmal mengatakan, Jahe pada tahun 2020, masuk kategori komoditas rempah yang diminati dunia. Jahe merupakan rempah-rempah 10 besar terlaris di tahun itu, yang ditunjukkan masuk pada 10 besar produk rempah dengan nilai ekspor tertinggi.

"Data kementerian perdagangan yang dipublikasikan pada tahun 2021, gambaran Nilai ekspor Jahe tahun 2020 menunjukkan angka sebesar US\$ 1,35 miliar. Indonesia dengan kondisi alamnya, sangat mumpuni untuk menghasilkan komoditas

ini. Saya mendorong para petani jahe, untuk masuk wilayah ekspor dengan konsekuensi, kualitas produk yang dihasilkan harus memenuhi standar internasional", urai Akmal dalam dialognya.

Politisi PKS ini menambahkan, di tahun 2021, tren permintaan jahe dari Luar negeri masih tetap tinggi.

"Awal Januari tahun lalu, banyak dari negara tetangga kita, seperti Malaysia atau Singapura, membutuhkan jahe dari negara kita. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian

dapat memfasilitasi ekspor ini terutama dari Badan Karantina," ujarnya.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menguraikan, dari ribuan jenis tanaman biofarmaka yang sangat dibutuhkan dunia, yang sudah dikembangkan Indonesia untuk komoditas andalan ekspor baru 13 jenis dengan jahe sebagai komoditas andalan.

"Ini kesempatan buat bapak-bapak petani jahe, untuk fokus pengembangan dan peningkatan produk jahe ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita akan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar terus memberikan bimbingan sehingga ada percepatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pra, masa tanam hingga pasca panen", pungkasi Andi Akmal Pasluddin.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"Ini kesempatan buat bapak-bapak petani jahe, untuk fokus pengembangan dan peningkatan produk jahe ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita akan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar terus memberikan bimbingan sehingga ada percepatan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pra, masa tanam hingga pasca panen"



Live Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal di Dapil, Nasir Gandeng Genpro Ajak Peduli Produk Halal

KUTIPAN

Banda Aceh (01/03) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil melakukan Sosialisasi Undang-Undang mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertempat di sebuah restoran Aceh Seafood pada Senin (28/02/2022).

Kegiatan yang bekerjasama dengan Global Entrepreneur and Profesional (GENPRO) Aceh ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu, dimana pelaku usaha mendengarkan langsung pemaparan materi oleh Nasir Djamil.

Nasir mengajak para peserta yang hadir untuk lebih peduli dan 'ketat' dalam memilih bahan-bahan makanan yang dikonsumsi hari-hari. Ia mengingatkan bahwa arus globalisasi masuk dalam tiga hal yaitu fashion, fun and food.

"Agama Islam sangat peduli pada segala aktivitas pemeluknya dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan diatur sedemikian rupa, termasuk menyangkut

makanan. Mari mencari yang halal dan menjauhi yang haram," kata Nasir.

Pemeluk Agama Islam di Indonesia pastinya membutuhkan jaminan produk halal sebagai upaya menjalankan perintah Allah SWT.

Secara regulasi akan kepastian hukum ini telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur hal rantai produksi dari pelaku usaha hingga konsumen.

"Gaya hidup halal perlu kita perkuat baik di sektor makanan, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Produk makanan halal di luar negeri bisa menjadi

pilihan dan favorit para pengunjung disebuah negara, tidak hanya bagi seorang muslim namun juga non-muslim, itu menjadi pertanda bahwa ada kebaikan dan keberkahan Allah SWT titipkan didalamnya," ujar Nasir.

Pada kesempatan tersebut beberapa wirasaha millennial berbagi cerita kepada Anggota Komisi III DPR RI tersebut, mereka sangat antusias dan bersemangat untuk membangun Aceh dari sektor bisnis.

Ada banyak harapan dan aspirasi yang disampaikan peserta secara langsung kepada Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bahwa kedepan semoga semakin jelas dan terlihat kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memberikan perhatian kepada pengusaha dan pelaku UMKM di Aceh, sebagai upaya mendorong roda perekonomian masyarakat berjalan baik.

Senada dengan Nasir, Area Vice Presiden Genpro Aceh, Munardi Nazwar mengatakan sebagai komunitas Genpro akan terus meningkatkan kapasitas-



H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"Gaya hidup halal perlu kita perkuat baik di sektor makanan, obat-obatan, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya. Produk makanan halal di luar negeri bisa menjadi pilihan dan favorit para pengunjung disebuah negara, tidak hanya bagi seorang muslim namun juga non-muslim, itu menjadi pertanda bahwa ada kebaikan dan keberkahan Allah SWT titipkan didalamnya"

nya dalam pengembangan usaha dan mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi jaminan produk halal.

"Genpro terus melakukan perbaikan yang dimulai dari kepala (mindset) akan bisnis itu sendiri dan untuk terciptanya ekonomi kreatif yang

masyarakat, sehingga produk-produk lokal yang halal semakin mendapatkan perhatian. Sosialisasi UUJPH oleh Bapak Nasir Djamil menjadi alarm dan pengetahuan yang penting bagi pelaku usaha di komunitas kami" ungkap Munardi.



Kunjungi Kelompok Tani Subang, Nurhasan Zaidi Optimis Pertanian Modern Bangkitkan Ekonomi Indonesia

KUTIPAN

Subang (05/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengunjungi masyarakat dan komunitas kelompok tani di daerah pemilihannya, kecamatan kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh struktur dan kader PKS setempat, perwakilan kelompok tani seperti petani karet, petani bumbu, dan peternak ayam, pengusaha muda, juga unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kaum ibu juga masyarakat setempat, termasuk anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Subang, Asep Hadian.

Dihadapan warga yang hadir, Aleg PKS asli Majalengka ini mengingatkan bahwa Subang merupakan salah satu daerah potensial, terutama potensi alamnya yang sangat kaya. Tugas negara adalah mengelola potensi tersebut

secara produktif sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Kekayaan alam di sekitar kita hakikatnya milik masyarakat, negara perlu hadir untuk mensupport dan mengelolanya secara adil dan profesional sehingga bermanfaat dan kembali ke masyarakat", ungkapnya.

Menurutnya, sumber reze ki atau potensi ekonomi daerah yang paling besar peluangnya adalah perdagangan, perkebunan dan pertanian. Ini merupakan sumber motivasi bagi kita untuk semakin yakin dan optimis dengan aktivitas kita sebagai petani, pedagang, peternak, dan sebagainya.

Politisi yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta industri ini juga menyemangati warga agar terus mengembangkan sektor pertanian dan membuka diri terhadap penerapan teknologi modern karena ini menjadi potensi bangkitnya ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

"Kita mendorong Subang menjadi daerah potensial utama pertanian modern Indonesia masa depan, karena aksestabilitas dan potensi sumberdaya nya sangat mendukung. Bismillah, dengan semangat transformasi di era teknologi dan kolaborasi berbagai sisi kita bisa, Inshaallah", tegasnya.

Nurhasan juga akan meminta pemerintah untuk hadir memberi solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi para petani dilapangan serta mendorong masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga bisa memilih pimpinan daerah maupun negara serta anggota



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Kita mendorong Subang menjadi daerah potensial utama pertanian modern Indonesia masa depan, karena aksestabilitas dan potensi sumberdaya nya sangat mendukung. Bismillah, dengan semangat transformasi di era teknologi dan kolaborasi berbagai sisi kita bisa, Inshaallah"

DPR yang amanah.

"Rakyat mesti cerdas memilih dan mengenal pimpinan daerah maupun anggota dewan yang akan dipilihnya. Untuk memilih calon mantu saja mesti teliti, apalagi memilih pemimpin atau Wakil Rakyat tentu mesti lebih teliti", lanjutnya.

Pada penghujung acara sosok yang akrab dengan semua kalangan ini berharap

agar masyarakat semakin cerdas dan kritis kepada bagaimana kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, disamping tetap berupaya agar berbagai aktivitas positif terutama pada masa pandemi Covid-19 ini tetap berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Penanganan Gempa Pasaman dan Pasaman Barat, Nevi Galang Bantuan

KUTIPAN

Pasaman Barat (28/02) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, terjun langsung menemui masyarakat terdampak gempa kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk memberi dukungan moril memberi semangat dan materil untuk bertahan di situasi krisis.

Nevi Mengatakan, Peristiwa gempa bumi yang melanda wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman-Barat Sumatera Barat beberapa waktu hingga Minggu, 27 Februari 2022 ini telah menguji masyarakat Sumbar agar tetap sabar dan saling tolong menolong sesama.

"Penanganan gempa berkelanjutan perlu dilakukan dengan membangun kembali rumah warga agar kembali pada kehidupan normal walau di masa pandemi. Musibah yang datang kali ini, kita tetap yakin pada Allah SWT ini adalah cobaan dan dapat meningkatkan iman kita semua sekaligus membangun rasa kemanusiaan antar sesama", tutur Anggota DPR Komisi VI itu.

Nevi menerangkan, bahwa selain yang diupayakan dari pribadinya, la menggalang donasi berbagai pihak dari mitranya di DPR maupun rekan-rekannya di wilayah Sumbar maupun pusat berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta termasuk urang rantau.

"Ratusan juta rupiah terkumpul dalam waktu singkat menunjukkan betapa kepedulian sesama masih terasa kuat untuk membantu warga Indonesia yang sedang dilanda musibah bencana alam", ungkapnya.

Politisi PKS ini berharap, dengan hadirnya seluruh elemen mulai dari Gubernur, Danrem, Kapolda, Wakapolda, Mensos, Pangdam BB, BIN,

KASAD, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Prop. SUMBAR, semua sechingan segera berlalu sehingga Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dapat kembali pulih seperti sedia kala.

"Alhamdulillah saya dapat turut hadir langsung meninjau masyarakat terdampak gempa. Bersama para relawan Indonesia, ke kemah-kemah pengungsi sementara, meninjau rumah ibadah yang rusak, menyerahkan bantuan dan memberi semangat agar warga tetap kuat dan tabah untuk kembali bangkit pasca gempa", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

"Penanganan gempa berkelanjutan perlu dilakukan dengan membangun kembali rumah warga agar kembali pada kehidupan normal walau di masa pandemi. Musibah yang datang kali ini, kita tetap yakin pada Allah SWT ini adalah cobaan dan dapat meningkatkan iman kita semua sekaligus membangun rasa kemanusiaan antar sesama"



Soal Keppres Tak Sebut Soeharto

Aleg PKS: Pemerintah Mesti Hargai yang Berperan dalam Peristiwa 1 Maret

KUTIPAN

Jakarta (07/03) — Polemik tidak dicantumkannya peran Presiden ke-2 Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Pengagakan Kedaulatan Negara terus bergulir.

Menanggapi hal ini Anggota DPR RI asal Yogyakarta, Sukamta juga merasa Kepres ini keterlaluhan karena tidak menyebut nama Soeharto dalam peristiwa bersejarah tersebut.

"Kalau semangat pemerintah merajut rasa kebangsaan dalam memberikan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan RI, akan lebih baik disebutkan semua nama-nama tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut. Ada beberapa versi sejarah Serangan Umum 1 Maret, semuanya pasti menyebut nama-nama tokoh yang punya peran penting dalam peristiwa tersebut. Akan lebih baik semua

disebutkan dalam Kepres. Ini bentuk penghargaan yang nyata dari pemerintah. Keluarga mending tokoh-tokoh pejuang dari pemerintah," jelas Sukamta.

Menurut Sukamta, pemerintah perlu mencontoh Sri Sultan HB X yang dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini saat menyampaikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret, selain menyebut Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan tersebut dan Panglima Jenderal Sudirman, juga menyebut peran Soeharto sebagai komandan Wehrkreise III.

"Selama ini nama Sri Sultan HB IX sebagai penggagas

serangan umum jarang disebut, sebagian pihak menganggap ini karena ada sejarah versi Pak Harto. Namun Sri Sultan HB X tetap menyebut nama beliau bukan menghilangkannya, ini menunjukkan sikap kebangsaan yang adiluhung," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap pemerintah menghentikan kebiasaan mengeluarkan keputusan atau edaran yang mengundang kontroversi.

"Sudah berulang-ulang pemerintah buat keputusan atau edaran yang hanya mengundang polemik dan kegaduhan. Belum lama ini muncul permenaker Jaminan Hari Tua (JHT), kemudian surat edaran soal pengeras suara masjid dan musala, dan sekarang Kepres soal Serangan Umum 1 Maret. Ini ujung-ujungnya pro kontra, ada pembelahan di tengah masyarakat, muncul saling olok-olok di media sosial. Ini jelas kontra produktif dan menghabiskan energi bangsa di tengah upaya bangkit dari pandemi," tutup Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Di Yogyakarta

"Pemerintah perlu mencontoh Sri Sultan HB X yang dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini saat menyampaikan peristiwa Serangan Umum 1 Maret, selain menyebut Sri Sultan HB IX sebagai penggagas serangan tersebut dan Panglima Jenderal Sudirman, juga menyebut peran Soeharto sebagai komandan Wehrkreise III."

Tebar Benih Ikan Kerapu Macan Perdana

Aleg FPKS Saadiah Uluputty

Ajak Masyarakat SBB

Budidaya Ikan

KUTIPAN

Seram Barat (04/03) — Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon menyalurkan bantuan 5.000 ekor benih ikan kerapuh macan kepada 10 kelompok budidaya ikan di Kabupaten SBB, Rabu 02/03/2022.

Bantuan benih ikan tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST.

Acara penyaluran bantuan benih ikan tersebut langsung diterima oleh masing-masing kelompok budidaya. Selain penyaluran benih ikan, juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis budidaya di SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat Dusun Wael, Kecamatan Seram Barat.

"Anggota DPR RI komisi IV, Saadiah Uluputty, ST dalam kesempatan itu mengatakan,

dirinya akan selalu siap mendampingi berbagai program budidaya ikan maupun peningkatan SDM petani di Maluku khusus di kabupaten SBB.

Kabupaten SBB memiliki potensi perikanan yang sangat luas, yang jika dikelola secara baik akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dalam penyaluran benih dan pakan ikan ini harus benar-benar fokus di satu tempat dulu, dimana di SBB sendiri ada 10 kelompok budidaya ikan Kerapu Macan. Diantaranya di Dusun Wael, Dusun Lupesi, Dusun Kotania Atas, Kotania Bawah dan Dusun Pelita Jaya. Masing-masing kelompok

budidaya menerima 500 ekor benih ikan Kerapu Macan yang berukuran 5-7 cm," ujarnya.

Dengan penyaluran tersebut, diharapkan kepada seluruh kelompok pembudidaya ikan agar lebih tekun, ulet, dan serius dalam mengembangkan usaha budidaya ikan serta terus meningkatkan keterampilan melalui pelatihan usaha budidaya ikan yang handal, sukses, dan mandiri, demi meningkatkan pendapatan keluarga, pemenuhan gizi keluarga, serta memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan keluarga," harap Uluputty.

"Dalam kesempatan yang sama Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Turaya Samal, S.H.I mengatakan, kita patut bersyukur dan mengapresiasi program komisi IV DPR RI dalam hal ini aspirasi Ibu Saadiah Uluputty. Dimana program ini sangat penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat SBB. Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat dalam hal ini kelompok budidaya penerima benih ikan Kerapu Macan sehingga tujuan utama



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Kami berharap keseriusan, keuletan, dan kerja sama dari pembudidaya ikan, terkait apa yang sudah dan akan disalurkan oleh DPKP mampu meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan produksi perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga"

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," papar Samal.

Selain menggandeng Kami sebagai komisi II DPRD Provinsi Maluku yang membidangi sektor yang sama Kelautan dan Perikanan, Kami juga akan mewujudkan program program

lainnya, misalnya melihat kekurangan kekurangan yang dibutuhkan SMK Negeri 3 Seram Bagian Barat dalam hal yang berhubungan langsung dengan jurusan jurusan yang diajarkan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Masa Reses di Dapil, Mahfudz Abdurrahman Kembali **Launching** Mobil Ambulance

KUTIPAN

Bekasi (28/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI Kota Bekasi dan Kota Depok, Mahfudz Abdurrahman, melaunching mobil ambulans di dapil Jawa Barat VI, kali ini di wilayah Bekasi Utara Kota Bekasi.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian safari kunjungan silaturahmi ke konstituen di daerah pemilihan.

Mahfudz menyebut, launching mobil ambulance bersama pengurus Masjid Nurussa'adah yang didampingi oleh para pengurus RW di lingkungan perumahan Taman Wisn Asri Bekasi Utara dan tokoh masyarakat seperti Bapak Heri Purnomo (Anggota DPRD Kota Bekasi), Abdul Ghofur (Ketua DPC PKS Bekasi Utara) dilakukan untuk memperluas manfaat dan mendukung pelayanan sosial kepada jamaah masjid khususnya dan warga di perumahan Wisma Asri Bekasi Utara umumnya.

Anggota Fraksi PKS Komisi

VI DPR RI itu mengatakan, bahwa keberadaan masjid tidak hanya untuk memberikan layanan beribadah khusus saja seperti sholat, tetapi bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi seperti layanan sosial dan ekonomi bagi para jamaah dan warga sekitar.

"Sebagai Aleg PKS tentunya di tengah masyarakat akan terasa apabila segenap anggota PKS berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal dalam memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat," pungkasnya.

Kontribusi tersebut, imbuhnya, dapat diwujudkan melalui inisiatif para anggota PKS yang tersebar di tengah masyarakat untuk mengulurkan

bantuan dalam berbagai bentuk seperti bersama dalam pengadaan mobil ambulance.

"Saya sangat bersyukur bisa hadir dalam kegiatan launching mobil ambulance ini. Tentunya pelayanan kepada masyarakat, tidak melulu tentang bantuan finansial. Makna kontribusi itu luas, pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang dapat meringankan kesusahan dan kesulitan masyarakat". ujar Mahfudz dalam acara launching ambulans di daerah pemilihannya Jawa Barat 6, Minggu (27/02/2022).

Mahfudz Abdurrahman juga mengatakan, bantuan dan kontribusi dalam pengadaan unit ambulans diharapkan dapat membantu program sosial bagi para jamaah dan warga sekitar masjid.

Sebelumnya Bendahara DPP PKS melaunching unit mobil ambulance PKS di wilayah Pondok Gede Kota Bekasi.

Selain itu, Mahfudz mengapresiasi keberadaan relawan satgas bencana di



H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Saya sangat bersyukur bisa hadir dalam kegiatan launching mobil ambulance ini. Tentunya pelayanan kepada masyarakat, tidak melulu tentang bantuan finansial. Makna kontribusi itu luas, pelayanan kepada masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga sumber daya lain yang dapat meringankan kesusahan dan kesulitan masyarakat

daerahnya yang bekerja terus dan profesional membantu masyarakat selama bencana berlangsung. Sebagai wujud dukungan, Mahfudz Abdurrahman telah melaunching beberapa ambulance

di Kota Bekasi dan kedepannya akan kembali berusaha berkontribusi dalam pengadaan mobil ambulance di beberapa titik di daerah pemilihannya.



Tuesday, March 8

International Women's Day 2022



9 ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN FRAKSI PKS DPR RI

Hj. Nevi Zuairina ● Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL. ● Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag ● Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A ● Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si. ● Saadiyah Uluputty, S.T ●
Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Masa Reses, Iskan Qolba Lubis Terima Keluhan Kondisi Jalinsum dan Masalah PKH di Madina

KUTIPAN

Mandailing Natal (26/02) — Dalam upaya menerima masukan dari konstituennya di Kabupaten Mandailing Natal Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) Iskan Qolba Lubis melaksanakan reses di Kabupaten Mandailing Natal, di aula DPD PKS Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu (26/02/2022).

Dalam acara tersebut peserta reses mengeluhkan kondisi Jalan Lintas Sumatera yang ada di Kabupaten Mandailing Natal juga masalah peserta PKH yang dari Kemensos menjadi keluhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut masyarakat menjelaskan bahwa kondisi Jalinsum yang dinilai kurang diperhatikan oleh Pemerintah, terbukti dengan kondisi yang sudah lama tidak pernah ada perbaikan sementara Jalinsum sering dilewati oleh kendaraan yang cukup besar dan barang barang

perusahaan.

Selain masalah kondisi Jalinsum masyarakat juga mengeluhkan dengan banyaknya penerima PKH yang tidak tepat sasaran karena banyak penerima adalah keluarga yang sudah mapan dan mampu, bahkan masih ada penerima PKH di Madina yang mempunyai mobil mewah.

"Di Mandailing Natal banyak penerima PKH adalah keluarga yang sudah mapan dan bahkan ada yang mempunyai mobil mewah juga mempunyai rumah mewah, padahal di

sekitarnya masih lebih banyak keluarga yang kurang mampu," ujar masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa sebagai Anggota DPR RI sudah merupakan kewajiban bagi dirinya untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya.

"Apa keluhan masyarakat di wilayah pemilihan saya, insya Allah akan disampaikan kepada pemerintah pusat, saya hanya meminta do'a kita semua sehingga dapat menyuarkan aspirasi masyarakat terutama di wilayah daerah pemilihan saya yaitu Sumut 2 termasuk Kabupaten Mandailing Natal ini," Ujar Iskan Qolba Lubis.

Dijelaskan Iskan Qolba bahwa masalah PKH adalah berada dibawah naungan Kementerian Sosial dimana mitra kerja Komisi VIII DPR RI, apa yang disampaikan masyarakat adalah merupakan masukan yang cukup bagi kami untuk disampaikan kepada Pemerintah.

"Itulah gunanya ada perwakilan masyarakat di DPR RI untuk menyampaikan keluhan



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Apa keluhan masyarakat di wilayah pemilihan saya, insya Allah akan disampaikan kepada pemerintah pusat, saya hanya meminta do'a kita semua sehingga dapat menyuarkan aspirasi masyarakat terutama di wilayah daerah pemilihan saya yaitu Sumut 2 termasuk Kabupaten Mandailing Natal ini

masyarakat kepada Pemerintah, sehingga Pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya," tutup Iskan Qolba Lubis.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD PKS Madina

Wahiddin Arjun Rambe, Korda Tabangsel DPW PKS Sumatera Utara Awaluddin, Seluruh pengurus DPD PKS dan sejumlah pengurus DPC PKS se Kabupaten Madina.

Aus Hidayat Nur Hadiri Isra' Mi'raj PKS Balikpapan Bersama Ketua MUI

KUTIPAN

Balikpapan (2/3) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di Balikpapan, Senin, (28/02/2022).

Acara dihadiri oleh Pengurus DPD PKS Balikpapan dan Pengurus DPC PKS dari 6 kecamatan di Balikpapan dengan mengundang Penceramah Ketua MUI Balikpapan Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri dan juga dihadiri sejumlah tokoh. Diantaranya Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari Fraksi PKS KH. Aus Hidayat Nur.

Dalam sambutannya, Aus Hidayat Nur mengapresiasi kegiatan peringatan Isra' Mi'raj yang telah mengundang Ketua MUI sebagai penceramahnya.

"Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala tentunya. Dalam Isra' Mi'raj ini kita kehadiran tamu istimewa yaitu Ketua MUI Kota Balikpapan, pemimpin tertinggi umat Islam di kota Balikpapan, Kyai Haji

Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri. Beliau seorang Habib sahabat Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Lc., M.A. Ketua Majelis Syuro PKS. Alhamdulillah PKS dipimpin oleh seorang Habib," ujar Aus Hidayat Nur.

Anggota Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI inipun berterimakasih secara khusus kepada KH. Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri selaku Ketua MUI Kota Balikpapan yang berkenan memberikan tausiah kepada PKS di acara Isra Mi'raj.

Selain itu, Aus Hidayat Nur juga mengajak kepada segenap pengurus dan anggota PKS Balikpapan agar menjadikan momentum Isra' Mi'raj sebagai sarana mengambil hikmah kepemimpinan dari pemimpin besar Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.



KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi II DPR RI

"Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala tentunya. Dalam Isra' Mi'raj ini kita kehadiran tamu istimewa yaitu Ketua MUI Kota Balikpapan, pemimpin tertinggi umat Islam di kota Balikpapan, Kyai Haji Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri. Beliau seorang Habib sahabat Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Lc., M.A. Ketua Majelis Syuro PKS. Alhamdulillah PKS dipimpin oleh seorang Habib,"



Masa Reses, Diah Nurwitasari **Hadiri** Bimtek Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah

KUTIPAN

Kabupaten Bandung (02/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menghadiri Bimtek Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil Menengah Kabupaten Bandung di Sunshine, Kementerian Perindustrian RI.

Dengan tetap menjaga prokes, 140 peserta dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung menghadiri acara bimtek Industri Kecil Menengah (IKM) ini.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian, Dini Hanggandari, Anggota DPR-RI Komisi VII Diah Nurwitasari dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugerah.

Dalam sambutannya Dini Hanggandari mengungkapkan

bahwa program ini digulirkan untuk mengatasi masalah bertambahnya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

"Mudah-mudahan program hasil kerjasama Kemenperin dan Komisi VII DPR-RI ini mampu meningkatkan kemampuan peserta untuk berkarya menghasilkan sesuatu yang berdaya jual bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya," pungkask Diah.

Sejalan dengan apa yang disampaikan pejabat Kemenperin, Diah Nurwitasari

menyampaikan kepada para peserta.

"Pelatihan ini bukan hanya sekedar menumbuhkan dan mengembangkan penghasilan peserta, tapi yang lebih penting adalah menumbuhkan harapan di tengah kondisi pandemi yang serba sulit ini. Saya harap para peserta dapat mengikuti program ini secara penuh dan maksimal agar tujuan-tujuan pelatihan ini dapat dicapai dengan baik." ucap anggota Komisi VII dari fraksi PKS ini.

Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 4 Maret 2022 yang dibagi ke dalam beberapa kelas, diantaranya bengkel roda dua, service handphone, kerajinan kayu, olahan makanan, roasting kopi, batik dan konveksi.

"Semoga program ini bisa membantu menaikkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung." pungkask Diah Nurwitasari.



Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Mudah-mudahan program hasil kerjasama Kemenperin dan Komisi VII DPR-RI ini mampu meningkatkan kemampuan peserta untuk berkarya menghasilkan sesuatu yang berdaya jual bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya"



Bukhori Serahkan Bantuan Sosial dalam Giat Reses di Dapil Kendal Sebesar 65 M

KUTIPAN

Kendal (02/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan sosial senilai Rp65 miliar kepada warga di dapil Kabupaten Kendal.

Bantuan sosial tersebut terdiri dari bantuan ATENSI, bantuan sembako/BPNT, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bukhori mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari program percepatan penyaluran bantuan sosial yang merupakan hasil kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI menyusul temuan atas dana bansos yang masih tersisa sebesar Rp2,7 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam rapat kerja pada 19 Januari 2022, Menteri Sosial menyatakan dari total anggaran Kemensos senilai Rp108 triliun, anggaran yang berhasil terealisasi baru Rp105 triliun.

Sedangkan sebagian besar dari dana yang belum terealisasi tersebut merupakan dana bansos senilai Rp2,7 triliun. Dia menambahkan, alasan mandeknya penyaluran dana tersebut dikarenakan pihak bank penyalur tidak kunjung menyerahkan kartu bansos kepada warga penerima manfaat.

"Program percepatan penyaluran dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia dan diharapkan rampung sebelum tanggal 5 Maret 2022. Program percepatan penyaluran dengan disupervisi langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI adalah untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada pihak yang tepat dengan jumlah

yang tepat," ujar Bukhori dalam siaran persnya, Rabu (02/03).

Lebih lanjut, politisi dapil Jawa Tengah 1 ini memberikan jumlah penerima manfaat dari masing-masing bantuan sosial yang diberikan kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Kendal. Bantuan ATENSI yang diserahkan meliputi beasiswa bagi anak yatim, modal kewirausahaan, serta tongkat adaptif dan kursi roda bagi penyandang disabilitas kepada 171 penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan sembako/BPNT dan PKH masing-masing diberikan kepada 72.731 dan 31.475 penerima manfaat.

Selain melakukan pengawasan, politisi PKS ini juga membuka layanan pengaduan bansos bagi warga penerima manfaat apabila mendapati keluhan terkait bantuan sosial yang diterima. Bukhori mengatakan layanan aduan tersebut dibuka untuk menjembatani kepentingan antara warga dan pemangku kebijakan secara langsung dan real-time sehingga masalah seputar bansos dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.

"Kami sudah membagikan kontak kepada warga penerima manfaat apabila menemukan penyimpangan, seperti pengurangan item/nominal bantuan atau tidak diarahkan ke pihak-pihak tertentu dalam proses pencairannya. Walau



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Program percepatan penyaluran dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia dan diharapkan rampung sebelum tanggal 5 Maret 2022. Program percepatan penyaluran dengan disupervisi langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI adalah untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada pihak yang tepat dengan jumlah yang tepat

demikian, kami tidak membatasi layanan pengaduan ini hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga kepada unsur pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan (TKSK). Hal ini kami lakukan agar aspirasi yang kami terima dapat lebih luas dan

beragam sehingga advokasi yang kami lakukan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Sosial, dapat lebih komprehensif karena berdasarkan persoalan riil yang dialami oleh berbagai stakeholder Kementerian Sosial di lapangan," pungkasnya.



Kunjungi SLB Sumbawa, Johan Rosihan: PKS Punya Perhatian Lebih pada Kaum Disabilitas

KUTIPAN

Dalam kunjungan itu, Politisi PKS itu mengatakan bahwa PKS punya perhatian lebih kepada para kaum disabilitas. Ia pun berkomitmen untuk membantu Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan program yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sekolah ini nantinya.

Sumbawa (02/03) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan mengatakan bahwa Fraksi PKS sangat memberi perhatian kepada teman-teman disabilitas.

Seperti diketahui sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI juga mengadakan pertandingan dengan para kaum disabilitas di kompleks kantor DPR RI Senayan Jakarta.

Dalam kunjungan itu, Politisi PKS itu mengatakan bahwa PKS punya perhatian lebih kepada para kaum disabilitas. Ia pun berkomitmen untuk membantu Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan program yang nantinya bisa dimanfa-

atkan untuk keberlangsungan sekolah ini nantinya.

"Sebagai Anggota DPR, maulun secara personal, saya siap mendukung dan berkomitmen untuk membantu keluarga besar SLB Sumbawa ini sesuai wewenang dan saya di DPR," ungkap Johan.

Politisi asal Sumbawa itu mengatakan bahwa akan berkordinasi langsung dengan komisi terkait untuk menindaklanjuti beberapa usulan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SLB Sumbawa, Sri Wahyuningstih.

"Kita di PKS punya mekanisme antar Anggota DPR. Boleh jadi usulan-usulan bu

kepek ini bukan pada bidang di komisi saya, tetap saya pastikan bahwa masalah ini akan saya bawa ke tingkat Fraksi untuk saya sampaikan kepada Anggota DPR RI Fraksi PKS di komisi yang bersangkutan". Tutup Johan.

Kunjungan Johan Rosihan ke SLB Sumbawa dalam rangka Reses Anggota DPR RI. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua dalam rangka pertemuan dengan teman-teman Disabilitas.

Dalam pertemuan itu, turut hadir juga unsur pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Sumbawa, hadir pula pegiat disabilitas masyarakat secara umum.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Kita di PKS punya mekanisme antar Anggota DPR. Boleh jadi usulan-usulan bu kepek ini bukan pada bidang di komisi saya, tetap saya pastikan bahwa masalah ini akan saya bawa ke tingkat Fraksi untuk saya sampaikan kepada Anggota DPR RI Fraksi PKS di komisi yang bersangkutan".





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



HNW Sepakat dengan Parkindo, MPR Jaga Konstitusi dan Tolak Pengunduran Pemilu

KUTIPAN

Jakarta (02/03) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, ditemui secara daring oleh Pimpinan Pusat Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia).

HNW yang mendukung konsistensi menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa maupun cita-cita Reformasi, karenanya HNW juga sepakat dengan tuntutan Parkindo agar MPR menjaga dan menjalankan Konstitusi dan Amanat Reformasi yang salah satu ketentuannya adalah adanya Pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua kali masa jabatan, adanya pemilu sekali dalam 5 tahun, dan kedaulatan Rakyat yang memilih dalam Pemilu tersebut.

Maka HNW sepakat dengan Parkindo agar semua pihak menaati Konstitusi dan amanat Reformasi, karenanya menolak usulan pengunduran Pemilu atau perpanjangan

masa jabatan Presiden, karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 di pasal 1 ayat 2, pasal 7 dan pasal 22E ayat 1. Juga karena tidak sesuai dengan tuntutan Reformasi.

Hal tersebut disampaikan oleh HNW, sapaan akrabnya, saat berdialog kebangsaan 'Menuju Indonesia Tertib Konstitusi' dengan pengurus DPP Partisipasi Kristen Indonesia (PARKINDO) melalui daring, Selasa (01/03/2022).

Ormas ini adalah kelanjutan dari Orpol Parkindo (Partai Kristen Indonesia) yang berfusi dengan PDI pada zaman Orde Baru.

Dalam dialog kebangsaan ini dari Parkindo hadir antara lain Ketua Umum DPP Parkindo, L. Dolok Saribu, Waketum,

Corneles G dan Sekjend Beli Pangaribuan.

HNW menjelaskan bahwa baik Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan hasil kesepakatan para bapak dan ibu bangsa saat memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, maupun ketika melaksanakan tuntutan reformasi melalui amandemen UUD NRI 1945.

"Salah satu prinsip utama dan cita-cita bangsa Indonesia Merdeka adalah apa yang tertera di dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang dulu juga dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Disana ada keterlibatan tokoh nasional kebangsaan baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristiani yaitu Mr. AA Maramis. Pendapat beliau didengarkan, dan beliau juga mendengarkan pendapat tokoh-tokoh yang lain. Bahkan, ketika ada keberatan dari tokoh Kristiani Mr Johannes Latuharhary terkait Piagam Jakarta sebagaimana disampaikan sebagai aspirasi Indonesia timur, juga didengarkan dan dikabulkan oleh mayoritas mutlak anggota PPKI yang



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Jangan sampai kita sudah membuat kesepakatan, tapi malah tidak dilaksanakan. Itu tidak merawat warisan dan cita-cita luhur yang sudah terbukti dapat menyelamatkan cita-cita kemerdekaan dan eksistensi NKRI.

beragama Islam, untuk sama-sama melanjutkan dan menyelamatkan perjalanan kemerdekaan Indonesia," tukasnya.

HNW mengatakan bahwa pasca kesepakatan tersebut dihasilkan, semua pihak yang terlibat dalam pembahasan di BPUPK, Panitia 9 dan PPKI, konsisten menerapkan Pancasila yang final, juga UUD

1945. Juga saat Reformasi, ada 6 tuntutan Reformasi, termasuk Amandemen UUD untuk menetapkan masa jabatan Presiden, yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk Partai Politik dan Ormas.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***